



# LAPORAN KINERJA

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura,  
dan Perkebunan

# 2025

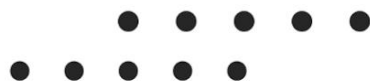




# LAPORAN KINERJA

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura,  
dan Perkebunan

# 2025



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Badan Pusat Statistik Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS.

Di dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 dan perkembangan capaian kinerja selama tahun 2025. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

Jakarta, 19 Januari 2026

Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura,  
dan Perkebunan,



Ir. Eko Marsoro, MM  
NIP. 196606251988021001

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.....	1
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	2
1.4 Potensi dan Permasalahan .....	7
1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik.....	11
2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2025-2029.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025.....	20
2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 .....	21
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan .....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025.....	29
3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhadap Target Renstra .....	41
3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	44
3.4 Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025.....	52
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	57
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Rekomendasi perbaikan kinerja.....	62
LAMPIRAN .....	64



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 – 2029 .....	20
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 .....	21
Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2023–2025 .....	30
Tabel 3. 2 Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran 2023–2025.....	33
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Utama Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 .....	34
Tabel 3. 4 Capaian IKS Utama 1.2.1.1 Tahun 2025 .....	35
Tabel 3. 5 Daftar Publikasi/BRS Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 36	
Tabel 3. 6 Capaian IKS Utama 2.2.1.1 Tahun 2025 .....	39
Tabel 3. 7 Realisasi Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2025.....	41
Tabel 3. 8 Output yang sudah dicapai selama tahun 2025.....	44
Tabel 3. 9 Kendala dan Solusi Pembinaan Sektor .....	45
Tabel 3. 10 Komposisi Realisasi Anggaran Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	57
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Utama Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 .....	59

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Kedeputusan Bidang Statistik Peroduksi ..... 2
Gambar 1. 2	Distribusi Pegawai Direktorat STPHP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 ..... 3
Gambar 1. 3	Distribusi Pegawai Direktorat STPHP Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2025 ..... 3
Gambar 1. 4	Komposisi Pegawai Direktorat STPHP Menurut Kelompok Jabatan dan Tingkat Pendidikan, 2025..... 4
Gambar 1. 5	Komposisi anggaran STPHP TA.2025 ..... 4
Gambar 3. 1	Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025 ..... 30
Gambar 3. 2	Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ..... 32
Gambar 3. 3	Penghargaan Terbaik III dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat..... 54
Gambar 3. 4	Penghargaan Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas..... 54
Gambar 3. 5	Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025..... 55
Gambar 3. 6	Penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI ..... 55
Gambar 3. 7	Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional..... 56
Gambar 3. 8	Penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia ..... 56
Gambar 3. 9	Penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia ..... 57



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 .....66
Lampiran 2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025..... 67
Lampiran 3	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025.....68
Lampiran 4	Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025.....69
Lampiran 5	Daftar K/L Target Pembinaan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 .....70
Lampiran 6	Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025 ..... 71
Lampiran 7	Daftar Inovasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025..... 72
Lampiran 8	Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2025 ..... 73



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP) merupakan Direktorat dibawah Kedeputusan Bidang Statistik Produksi. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat STPHP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat STPHP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman pangan;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik hortikultura; dan
- c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman perkebunan.

Pelaksanaan tugas Direktorat STPHP didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang berperan dalam berbagai aspek operasional dan teknis statistik.

Visi BPS adalah "*Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*". Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tiga misi, yaitu:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN);
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.

Tujuan BPS dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien;
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan misi tersebut adalah:

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu;

3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menunjukkan tingkat keberhasilan yang nyata (*significant results*). Dari hasil pengukuran seluruh indikator, capaian kinerja utama Direktorat STPHP mencapai tujuan dan sasaran dengan rata-rata 107,14 persen.

Nilai DIPA Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp 1.041.403.000,- pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Selama tahun anggaran 2025, Direktorat STPHP melakukan serapan anggaran sebesar 93,96 persen atau senilai Rp 978.454.154,-. Efisiensi anggaran yang dilakukan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2025 adalah sebesar 1,14 yang berasal dari besaran realisasi anggaran 93,96 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 107,14 persen. Hal ini berarti penggunaan anggaran di Direktorat STPHP sudah efisien karena angka efisiensinya sudah di atas 1.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu prinsip *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awal tahun 2025, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP) menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat STPHP 2025. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dicapai secara efektif, efisien, dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

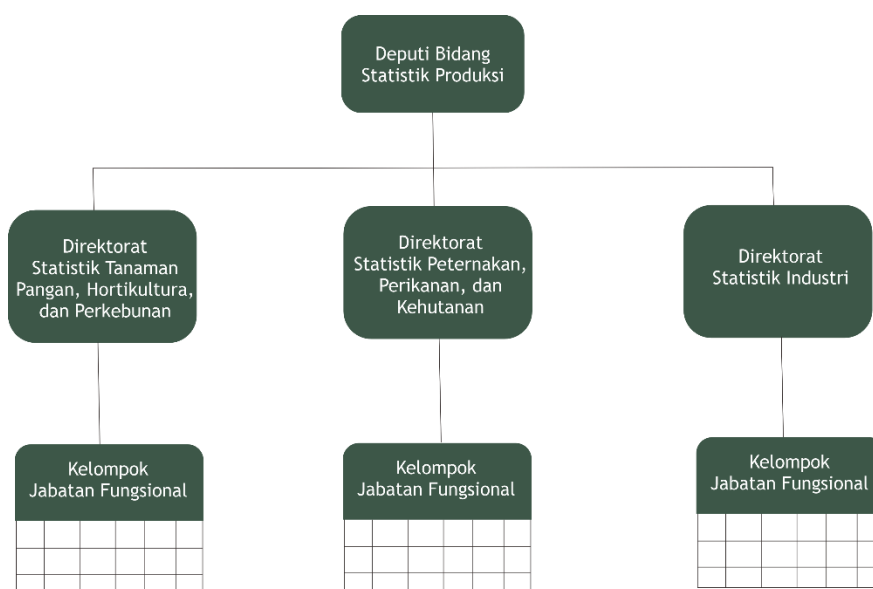
Penyusunan LAKIN Direktorat STPHP 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian maupun tantangan dalam pelaksanaan misi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini juga menjadi dasar evaluasi dan masukan untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang, guna meningkatkan efektivitas serta kontribusi Direktorat dalam menyediakan data statistik yang berkualitas.

### 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Direktorat STPHP merupakan Direktorat dibawah Kedeputusan Bidang Statistik Produksi. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat STPHP mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat STPHP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman pangan;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik hortikultura; dan
- c. Pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik tanaman perkebunan.

Susunan organisasi Direktorat STPHP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional, sesuai bagan berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Statistik Perproduksi

### 1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

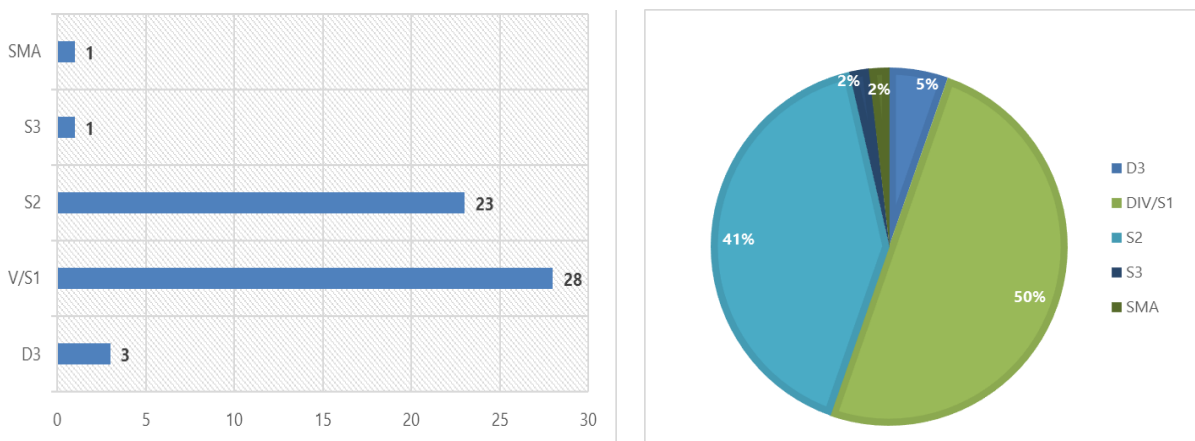
#### 1.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada akhir tahun 2025, jumlah SDM Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP) tercatat sebanyak **56 pegawai** (tidak termasuk direktur). Pegawai tersebut tersebar dalam berbagai kelompok jabatan, meliputi **Statistisi Ahli Madya (8 orang)**, **Statistisi Ahli Muda (22 orang)**, **Statistisi Ahli Pertama (14 orang)**, **Statistisi Penyelia (1 orang)**, **Statistisi Terampil (1 orang)**, **Arsiparis Ahli Pertama (1 orang)**, **Jabatan Fungsional Umum (1 orang)**, serta **Staf (8 orang)**. Staf merupakan pegawai yang tidak berada dalam jabatan fungsional, termasuk di dalamnya pegawai yang sedang menjalani tugas belajar maupun pegawai dengan status CPNS.

Ditinjau dari aspek kepangkatan, SDM Direktorat STPHP terdiri atas pegawai dengan golongan **II/c sebanyak 1 orang**, **II/d 1 orang**, **III/a 6 orang**, **III/b 10 orang**, **III/c 10 orang**, **III/d 15 orang**, **IV/a 7 orang**, **IV/b 5 orang**, dan **IV/c 1 orang**. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada golongan III dan IV yang mencerminkan tingkat pengalaman dan kompetensi kerja yang relatif matang.

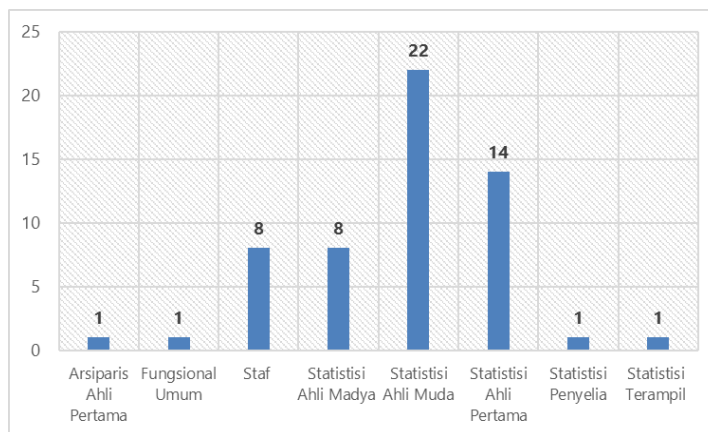
Secara tidak langsung, kualitas SDM juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Berdasarkan data pendidikan terakhir, pegawai Direktorat STPHP didominasi oleh pegawai berpendidikan **Strata 1 (DIV/S1) sebanyak 28 orang**, diikuti oleh **Strata 2 sebanyak 23 orang**. Selain itu, terdapat **3 pegawai berpendidikan Diploma 3**, **1 pegawai berpendidikan Strata 3**, dan **1 pegawai berpendidikan SMA**.

Dengan demikian, sekitar **92,86 persen pegawai Direktorat STPHP memiliki pendidikan Strata 1 ke atas**. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tergolong **cukup baik dan memadai** dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat STPHP secara optimal.



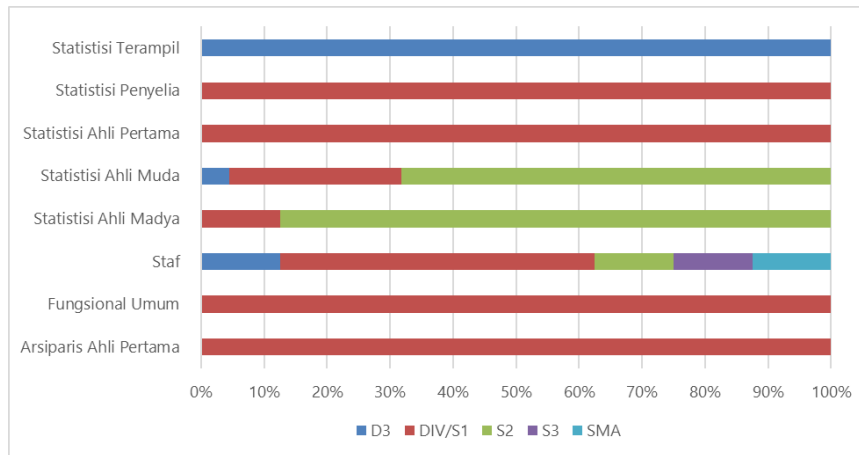
**Gambar 1.2 Distribusi Pegawai Direktorat STPHP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi pegawai di Direktorat STPHP, pada tahun 2025 terdapat **4 orang pegawai yang sedang menjalani tugas belajar**, yang terdiri atas pegawai yang menempuh pendidikan **Strata 3 (S3)** dan **Strata 2 (S2)**. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar tersebut **dimasukkan ke dalam kelompok staf**, yaitu pegawai yang tidak berada dalam jabatan fungsional selama masa tugas belajar. Jumlah pegawai berdasarkan kelompok jabatan fungsional dan tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.



**Gambar 1.3 Distribusi Pegawai Direktorat STPHP Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2025**

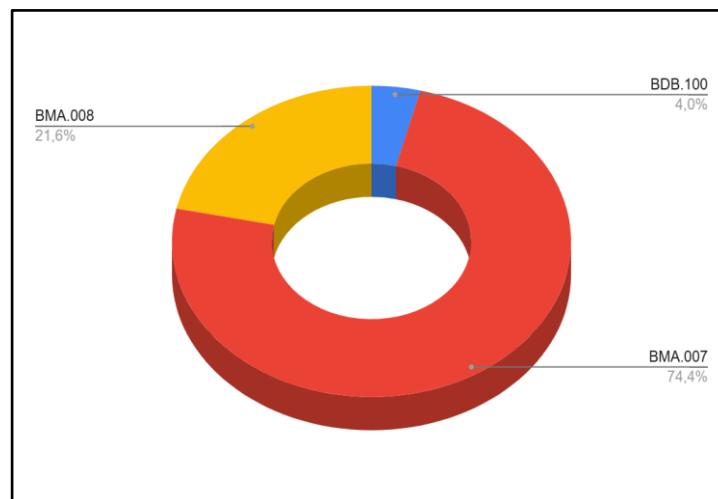




**Gambar 1. 4** Komposisi Pegawai Direktorat STPHP Menurut Kelompok Jabatan dan Tingkat Pendidikan, 2025

### 1.3.2 Dukungan Anggaran

Alokasi pagu awal Tahun 2025 dengan akhir tahun 2025 mengalami dinamika efisiensi/*self-blocking*, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mendapatkan anggaran pada awal tahun hingga akhir tahun mengalami perubahan yang disebabkan adanya rasionalisasi anggaran. Pada kondisi per 31 Desember 2025 tercatat bahwa anggaran Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebesar Rp. 1.041.403.000,- dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Persentase struktur anggaran STPHP pada kondisi akhir tahun 2025 sebagai berikut:



**Gambar 1. 5** Komposisi anggaran STPHP TA.2025

Meskipun menghadapi rasionalisasi/efisiensi anggaran yang signifikan, Direktorat STPHP berhasil mencapai serapan anggaran yang tinggi pada Tahun Anggaran 2025. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran dan pencapaian output program yang berkualitas. Beberapa kebijakan rasionalisasi pada Direktorat STPHP dan menyebabkan kurang optimalnya realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-812/02100/PR.400/2024 tanggal **20 Desember 2024** perihal Rasionalisasi Anggaran TA. 2025, menyebutkan bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dari Kementerian Keuangan, serta pemenuhan anggaran kegiatan teknis lainnya, diperlukan rasionalisasi terhadap anggaran yang telah tersedia di DIPA masing-masing satker, seperti pada pelatihan, paket meeting, perjalanan dinas, transport lokal, uang harian 8 (delapan) jam, honor narasumber, dan pencetakan dokumen/publikasi.
  - a. POK STPHP Rasionalisasi :  
POK : Rp. 14.833.269.000,- (dengan *consumable toner* sebesar Rp.9.872.138.000,-, untuk yang *available* sebesar Rp.4.961.131.000,-),
  - b. Link Surat <https://drive.bps.go.id/s/z8WJ5BFwxoXmjbf>
2. Surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-56/02000/PR.400/2025 tanggal **23 Januari 2025** perihal Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dan Efisiensi Anggaran 2025 di Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Nomor: S-27/PB/2025, Tanggal: 20 Januari 2025, Hal: Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2025, Tanggal: 22 Januari 2025, Hal: Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat rencana efisiensi dari penundaan proses perikatan/kontrak barang dan jasa terutama yang berasal dari jenis belanja barang dan belanja modal yang belum dilakukan sampai dengan surat ini diterbitkan, agar dilakukan penundaan sementara dan akan ada ada informasi terkait dengan efisiensi anggaran berikutnya.
3. Sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan sebagaimana Ketentuan dalam Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 untuk melakukan efisiensi pada rincian ATK, Kegiatan Seremonial, Rapat, Seminar dan sejenisnya, Kajian dan Analisis, Diklat dan Bimtek, Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, Percetakan dan Souvenir, Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan, Lisensi Aplikasi, Jasa Konsultan, Bantuan Pemerintah, Pemeliharaan dan Perawatan, Perjalanan Dinas, Peralatan dan Mesin, Infrastruktur, Belanja Lainnya, diterbitkan kebijakan efisiensi terhadap kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area, Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Perusahaan Perkebunan, Survei Hortikultura Dan Indikator Pertanian, dan Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga.
  - a. Kebijakan efisiensi yang dilakukan pada tanggal **27 Februari 2025** adalah :
    1. Belanja pada akun 524 dilakukan efisiensi 50%, berdampak pada Perjalanan dinas yang memerlukan transport lokal dan perjalanan dinas biasa dialokasikan maksimal 50% dari pagu awal; Pelatihan petugas tidak sepenuhnya dilaksanakan secara *offline*: 50% dari total JP dilaksanakan secara *offline* dan 50% selebihnya

dilaksanakan secara *online* perlu disediakan biaya paket data untuk pelatihan petugas; Paket meeting dalam rangka konsinyering, sosialisasi, *workshop*, maupun rekonsiliasi dilakukan secara *online*, kecuali ditetapkan untuk dilakukan secara *offline*. Paket meeting *offline* dapat diusulkan dengan tingkat urgensi tinggi dan atas seijin Sekretaris Utama; Perjalanan konsultasi dari BPS Daerah ke BPS Pusat ditiadakan dan dilaksanakan secara *online*, kecuali untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara online dan atas seijin Sekretaris Utama.

2. Perlengkapan pelatihan untuk petugas dialokasikan sebesar maksimal Rp 50 ribu.
  3. Anggaran honor untuk narasumber dialokasikan sebesar maksimal 50% dari pagu awal.
  4. Pendataan semaksimal mungkin menggunakan CAPI atau CAWI.
  5. Publikasi *paperless*, sehingga pencetakan, ATK, computer supplies serta pengiriman dokumen dialokasikan seminimal mungkin.
  6. Pembiayaan untuk pembinaan statistik sektoral di masing – masing unit eselon 2 di Pusat ditiadakan. Akan tetapi, kegiatan pembinaan statistik sektoral oleh masing – masing unit eselon 2 di Pusat agar tetap dijalankan.
- b. Surat kebijakan efisiensi ini disampaikan melalui surat Plt. Sekretaris Sestama nomor B-115/02000/PR.440/2025 tanggal 27 Februari 2025, Hal : Revisi DIPA Triwulan I TA 2025, yang menyebutkan kebijakan efisiensi yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian kegiatan yang berdampak pada revisi anggaran pasca efisiensi, link surat : <https://drive.bps.go.id/s/qEytiTDPboWYtKk>
4. Beberapa rincian kegiatan esensial tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya anggaran sebagai dampak dari rasionalisasi/*self blocking*, seperti anggaran perjalanan dinas biasa, dan perjalanan dinas paket *meeting*.
  5. Perkembangan pagu dari rasionaliasi anggaran untuk unit kerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) yang ada sebagai berikut (dalam rupiah):

Ranwal	Renja (Pagu Indikatif)_Rante Lama	Renja (Pagu Indikatif)_S BM Lama	Renja (Pagu Indikatif)	Renja (Pagu Anggaran)	Perjanjian Kinerja PPIS	Pagu per kondisi 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.935.567.000	3.450.873.000	6.329.041.000	6.389.680.000	5.210.488.000	5.804.569.000	1.041.403.000

Rasionaliasi anggaran yang terjadi dari ditetapkan pagu perjanjian kinerja sebesar Rp.5.804.569.000,- menjadi Rp.1.041.403.000,- sebesar 82,06 persen.

6. Kondisi pagu per agustus 2025 dan Desember 2025 sebagai berikut. Link pagu kondisi Agustus 2025: <https://drive.bps.go.id/s/dWgxljeAjcnLpf2> dan Link pagu kondisi 31



Desember 2025 <https://drive.bps.go.id/s/TYHam8cDgzjm3gL>. Pada tautan tersebut kondisi nilai pagu total per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.041.403.000,-

Nama kegiatan	Agustus 2025		Desember 2025	
	Pagu	Lock Pagu	Pagu	Lock pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BDB.100 PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	41.186.000	0	41.186.000	0
BMA.007 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN	1.882.305.000	1.047.297.000 (persentase lock pagu 55,63 persen)	775.008.000	0
BMA.008 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	448.640.000	223.431.000 (persentase lock pagu 49,80 persen)	225.209.000	0
Total	2.372.131.000	1.270.728.000 (persentase lock pagu 53,56 persen)	1.041.403.000	0
Pagu yang bisa digunakan	1.101.403.000		1.041.403.000	0

## 1.4 Potensi dan Permasalahan

### 1.4.1 Potensi

Potensi yang dimiliki oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah:

1. **Sumber daya manusia yang berkualitas**, ditunjukkan oleh sekitar **92,86% pegawai berpendidikan DIV/S1 ke atas**, dominasi pegawai pada golongan III dan IV, serta adanya pegawai yang sedang menjalani tugas belajar jenjang **S2 dan S3** sebagai upaya peningkatan kapasitas berkelanjutan.
2. **Dukungan sistem dan aplikasi statistik yang memadai**, seperti **KSA-Padi, KSA-Jagung, SPH-Online, dan SEDAPP Online**, yang mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan monitoring data secara efisien, terstandar, dan berkualitas.
3. **Peran strategis data statistik STPHP dalam kebijakan nasional**, di mana data dan publikasi dimanfaatkan dalam perumusan, perencanaan, dan evaluasi kebijakan, khususnya untuk prioritas nasional, komoditas strategis, serta penyusunan indikator makro seperti **Produk Domestik Bruto (PDB)**.

## 1.4.2 Permasalahan

Pada tahun 2025, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan penyediaan data dan pelayanan prima antara lain:

### A. Permasalahan/Kendala Kegiatan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

#### 1. Triwulan I (TW I)

- a. **Efisiensi anggaran dan perubahan timeline kegiatan**, khususnya pada VP–VN Hortikultura dan Komstrat Perkebunan, menyebabkan penyesuaian moda pengumpulan data dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- b. **Response rate survei masih rendah**, baik pada SPH maupun Survei Perusahaan Perkebunan, dipengaruhi oleh berkurangnya insentif petugas Dinas Pertanian, pergantian PIC perusahaan, serta penolakan sebagian responden.
- c. **Transisi dan perubahan sistem/aplikasi**, antara lain pengalihan sistem KSA Jagung dari BRIN ke BPS serta perubahan instrumen survei yang berdampak pada kebutuhan patch aplikasi.

#### 2. Triwulan II (TW II)

- a. **Perubahan kebijakan rilis data** (padi dan jagung dari semesteran menjadi bulanan) menambah beban penyesuaian proses pengolahan dan diseminasi data.
- b. **Kendala teknis aplikasi dan infrastruktur**, meliputi bug penggantian sampel KSA Jagung, gangguan *upload* akibat *maintenance* PDNS, *error* pada aplikasi FASIH (implementasi awal CAPI), serta keterbatasan jaringan di lapangan.
- c. **Kualitas dan ketepatan waktu pengolahan data belum optimal**, ditandai dengan keterlambatan dokumen dari Dinas Pertanian, rendahnya tingkat *cleaning data* di beberapa provinsi, serta *response rate* Survei Perusahaan Perkebunan yang masih rendah.

#### 3. Triwulan III (TW III)

- a. **Realisasi kegiatan lapangan belum optimal**, seperti SKGB yang terdampak kondisi panen (lewat panen atau belum panen) serta penggunaan moda CAPI yang masih memerlukan pendampingan *paper*.
- b. **Permasalahan konsistensi dan integrasi data**, meliputi ketidakkonsistenan tabel dan *dashboard*, data VP–VN yang belum sinkron, serta perubahan definisi/indikator (misalnya data upah buruh).
- c. **Response rate dan pengolahan data perkebunan masih terkendala**, termasuk finalisasi PKS dengan PTPN, *cleaning data* DPP 2025, serta kendala aplikasi Komstrat Perkebunan 2025.

#### 4. Triwulan IV (TW IV)

- a. **Dampak bencana banjir di Aceh**, yang menghambat kegiatan KSA dan pemutakhiran ubinan palawija di beberapa kabupaten/kota, baik yang belum dimulai maupun belum selesai.



- b. **Penyesuaian kuesioner dan rule validasi aplikasi**, khususnya pada FASIH dan Sedapp, yang memerlukan pembaruan aplikasi serta penyesuaian dengan ketersediaan dan efisiensi anggaran TA 2026.
- c. **Finalisasi dan validasi data perkebunan belum sepenuhnya optimal**, meliputi konfirmasi hasil estimasi Komstrat 2025, rendahnya *response rate* Survei Perusahaan Perkebunan, serta kendala teknis pada aplikasi pencacahan Komstrat 2025.

## B. Permasalahan / Kendala Pembinaan Statistik Sektoral (PSS)

### 1. Triwulan I (TW I)

- a. Internalisasi Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) di lingkungan Direktorat STPHP **terlambat dilaksanakan** dari jadwal akibat padatnya kegiatan prioritas pada awal tahun.
- b. Sebagian K/L binaan **hanya mengajukan kegiatan lama** untuk dibina, meskipun kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian selama dua tahun berturut-turut.
- c. Terjadi **keterlambatan input kegiatan pembinaan** yang telah dilaksanakan ke dalam aplikasi PSS.

### 2. Triwulan II (TW II)

- a. Pembinaan Statistik Sektoral dilaksanakan secara **daring melalui Zoom**, sehingga interaksi dan pendalaman materi belum optimal.
- b. Terdapat **keterbatasan anggaran** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PSS.
- c. **Keterbatasan waktu Walidata dan Subject Matter** di K/L, serta padatnya agenda kegiatan K/L, menyulitkan koordinasi dan tindak lanjut pembinaan.

### 3. Triwulan III (TW III)

- a. **Pemahaman terhadap materi pembinaan belum optimal**, karena seluruh materi disampaikan secara online tanpa pendampingan tatap muka yang memadai.

### 4. Triwulan IV (TW IV)

- a. Pemahaman materi pembinaan **masih belum optimal** karena metode pembinaan masih dilaksanakan secara *daring*.
- b. Meskipun telah dilakukan **Koordinasi Awal Pembinaan Statistik Sektoral (PSS)** dengan 7 K/L binaan pada Maret 2025 (*refreshing* materi, *updating* PIC, dan identifikasi kegiatan statistik sektoral), efektivitas pembinaan masih memerlukan penguatan pada tahap lanjutan.

## 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Dalam laporan ini berisi 3 bab dan lampiran yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

### BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, sumber daya manusia dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan, serta sistematika penyajian laporan.

### BAB 2 Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi visi, misi, target kinerja tahun 2025-2029, perjanjian kinerja utama dan proksi tahun 2025, dan dukungan BPS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.

### BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja organisasi Tahun 2025 yang membahas terkait dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025, serta capaian kinerja BPS terhadap target renstra, capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan isu strategis nasional Tahun 2025, prestasi dan inovasi, realisasi dan efisiensi anggaran.

### BAB 4 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

Visi merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi. Sementara itu, misi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi yang ditetapkan. Tujuan adalah pernyataan yang lebih spesifik dari misi. Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan.

Visi dan Misi BPS 2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Isu-isu strategis kelembagaan tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.  
BPS harus berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data melalui penyediaan berbagai indikator pembangunan.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.  
BPS berperan dalam mendukung Transformasi Digital Nasional melalui penyediaan data digital yang andal serta digitalisasi proses bisnis statistik.
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Bidang dan Sekretariat Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development)  
Keputusan tersebut memberikan mandat kepada BPS untuk menjadi Koordinator Bidang Statistik dan Data. Dengan demikian, BPS tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan praktik terbaik Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) pada statistik yang dihasilkannya, tetapi juga menjamin bahwa statistik yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga/dinas/instansi (K/L/D/I) telah mengacu pada standar yang sama sehingga dapat dijadikan rujukan data statistik di tingkat nasional dan internasional.
4. Adanya gejolak ekonomi global, peningkatan ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi informasi, arus data yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, disrupsi Revolusi Industri 4.0, dinamika ekonomi domestik, dan perubahan fokus program-program pembangunan pemerintah.

Hal tersebut mewajibkan BPS untuk senantiasa menyediakan statistik resmi yang berkualitas dan mampu memberikan wawasan bagi pengguna, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan pemerintah.

5. Independensi BPS dalam menjaga objektivitas dan netralitas indikator statistik.

BPS berperan penting dalam menyediakan indikator yang menggambarkan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. BPS harus menjaga independensi dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas dalam setiap kegiatan statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan dan terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Dengan adanya isu-isu strategis kelembagaan tersebut, BPS harus menjadi lembaga yang independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

### VISI

Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Penjelasan Visi BPS sebagai berikut:

1. Independen

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan. Cakupan independensi ini meliputi hak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, kebebasan dalam menentukan metodologi statistik yang merujuk pada standar internasional, serta kebebasan dalam menentukan jadwal publikasi data. Dengan independensi yang terjaga, BPS dapat membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan menyediakan data yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel.

2. Tepercaya

Sebagai lembaga yang tepercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, BPS dapat berperan sebagai pilar utama dalam Sistem Statistik Nasional.

### 3. Berperan Aktif

BPS berpartisipasi, berkontribusi, dan berdampak bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik dan efektif di level nasional maupun internasional.

### 4. Kebijakan Berbasis Data

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, BPS dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

### 5. Visi Presiden

Visi BPS dalam rangka mewujudkan visi presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dimana Visi Presiden merupakan *Ultimate Outcome* dari BPS.

Misi yang dirumuskan dalam mewujudkan visi BPS terdiri dari tiga misi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Misi ini merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan insight yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

#### 2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan memperkuat kepemimpinan dalam SSN, BPS mengoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien  
Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui efektivitas dan efisiensi, BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.

Tujuan BPS yang ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi BPS diantaranya sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga tepercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Penyelenggaraan Statistik

Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan diantaranya sebagai berikut:



1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik menandakan keberhasilan BPS dalam tiga aspek utama: efektivitas strategi diseminasi data; peningkatan kualitas dan relevansi informasi yang disediakan; dan kemampuan BPS dalam mendorong budaya penggunaan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan. Data statistik yang berkualitas dan mudah diakses berperan penting dalam:

1. Meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan publik melalui perumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi faktual;
2. Mengoptimalkan alokasi sumber daya pembangunan dengan dasar perencanaan yang lebih akurat dan terukur; dan
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel.

Risiko utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemanfaatan data statistik oleh pemangku kepentingan, yang disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya data statistik dalam proses pengambilan kebijakan. Risiko lainnya adalah keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan. Hal ini kerap disebabkan oleh proses pengumpulan dan pengolahan data yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber data alternatif seperti *big data*, data administratif, dan sumber data lainnya. Selain kedua penyebab tersebut, risiko keterlambatan dalam penyediaan data atau tidak tersedianya data yang relevan saat dibutuhkan juga disebabkan oleh kapasitas fiskal yang tidak sesuai rencana, yaitu adanya kebijakan efisiensi anggaran yang akan mengurangi tenaga lapangan, SDM pengolahan, dan infrastruktur pendukung.

Risiko di atas dapat menyebabkan keterlambatan yang berdampak pada penurunan kualitas kebijakan yang diambil. Penurunan ini disebabkan karena *stakeholder* terpaksa mengambil keputusan tanpa dukungan data yang akurat dan terkini. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan berpotensi dibentuk tanpa berlandaskan pada data atau bertentangan dengan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang sistematis dan berkelanjutan menjadi sangat penting. BPS perlu terus memperkuat strategi literasi data kepada para pengguna, memperluas kolaborasi strategis dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,

serta melakukan inovasi dalam metode diseminasi seperti penyediaan dashboard interaktif dan *platform data insight* yang mudah diakses. Selain itu, BPS juga perlu melakukan penjadwalan ulang dengan skala prioritas, rilis data secara bertahap (*modular release*) maupun memanfaatkan *big data* atau data administratif sebagai pelengkap. Melalui pendekatan tersebut, BPS dapat meningkatkan utilisasi data statistik dalam proses kebijakan secara berkelanjutan dan inklusif.

2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu  
Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sistem Statistik Nasional yang baik dan terpadu memiliki sejumlah keunggulan strategis, antara lain:

1. Menjamin keselarasan antar-data sektoral, sehingga menghindari duplikasi informasi dan memastikan koherensi indikator;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan data, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
3. Mendorong efisiensi dalam operasional statistik, melalui sinergi lintassektor dan optimalisasi penggunaan sumber daya.

Risiko pertama yang dihadapi sasaran strategis ini adalah duplikasi data atau rendahnya kualitas basis data dalam perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-instansi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Dampak dari risiko ini adalah pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang tidak tepat. Risiko kedua adalah inkompatibilitas data. Penyebabnya adalah tidak adanya standar tunggal dalam proses statistik antar sektor. Dampak dari risiko inkompatibilitas data adalah menurunkan kepercayaan terhadap sistem statistik nasional. Dengan mengelola risiko secara terencana, BPS memastikan Indeks Pembangunan Statistik meningkat secara konsisten, mendukung penyelenggaraan SSN yang berkualitas dan terpadu.

3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional  
Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks



ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Kinerja kelembagaan yang bersih dan profesional akan memperkuat:

1. Kepercayaan publik terhadap BPS sebagai lembaga statistik yang independen dan terpercaya;
2. Efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam menghasilkan statistik yang berkualitas dan tepat waktu; dan
3. Transparansi dan akuntabilitas, yang memperkuat peran BPS dalam mendukung kebijakan publik berbasis data.

Risiko utama adalah tidak optimalnya kinerja pegawai, yang ditandai dengan lemahnya budaya kerja positif, rendahnya adaptabilitas terhadap transformasi digital, serta minimnya motivasi dan penghargaan dalam lingkungan kerja. Keterbatasan sistem manajemen SDM, baik dari sisi teknologi maupun sistem pengembangan karir, turut menjadi penyebab rendahnya produktivitas dan kualitas layanan publik. Dampaknya adalah turunnya produktivitas kerja dan rendahnya kualitas layanan statistik yang diberikan kepada publik dan pemangku kebijakan.

Risiko lainnya adalah penyimpangan atau ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap tata kelola yang ada. Kondisi ini disebabkan oleh struktur organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap tuntutan strategis dari publik dan pemangku kebijakan, minimnya digitalisasi dalam proses manajemen kelembagaan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal. Ketiga faktor tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan dan inefisiensi dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dampak dari kondisi ini dapat memicu penurunan efisiensi organisasi, baik dalam pelaksanaan tugas internal BPS maupun dalam penyediaan statistik berkualitas. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kinerja dapat memunculkan potensi penyimpangan administratif maupun keuangan. Sehingga merusak kepercayaan publik terhadap integritas kelembagaan dan melemahkan kapasitas kelembagaan statistik BPS.

Selain itu, risiko juga muncul dalam bentuk rendahnya kolaborasi dan komunikasi lintas sektor. Minimnya ruang dialog yang partisipatif serta terbatasnya kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi penghambat dalam memperluas ekosistem statistik nasional yang kolaboratif. Sehingga menyebabkan pelemahan kapasitas kelembagaan statistik. Risiko ini dapat menyebabkan isolasi peran BPS dalam ekosistem data nasional. Selain itu, kondisi ini juga menghambat upaya membangun kepercayaan publik yang lebih luas terhadap BPS sebagai penyedia data terpercaya. Apabila kolaborasi dan komunikasi lintas sektor tidak berjalan dengan baik, maka pemanfaatan data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti menjadi kurang optimal. Melalui manajemen risiko

yang efektif, BPS dapat menjaga dan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, sehingga mendukung terwujudnya kinerja yang bersih, akuntabel, dan profesional. Upaya ini mencakup penguatan pengawasan internal, pengembangan SDM, inovasi layanan publik, dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPS, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (STPHP) sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyediaan data dan informasi statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas berperan dengan merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pada Direktorat STPHP. Sampai dengan penyusunan laporan kinerja Direktorat STPHP, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat STPHP belum dapat ditetapkan.

## **2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2025-2029**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun menengah. RPJMN 2025–2029 merupakan tahap pertama dari tahapan RPJPN 2025–2045. Pada tahap pertama ini, pembangunan akan difokuskan pada penguatan transformasi yang merujuk pada proses strategis untuk mempercepat perubahan fundamental dalam berbagai aspek pembangunan guna mencapai visi besar Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan berdaya saing global pada tahun 2045. Penguatan transformasi mencakup perubahan di bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar Pulau Jawa.

Transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis *merit*, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban



masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai. Sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Sementara itu, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi pada kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.

Di sisi lain, ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam Pembangunan karakter manusia menggerakkan modal sosial dalam masyarakat, peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk sumber energi terbarukan, penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sehubungan dengan penguatan transformasi tersebut, peran strategis Direktorat STPHP, sesuai Rancangan Awal RPJMN 2025–2029, tertuang dalam 4 (enam) proyek pembangunan (PropP) yang meliputi:

1. Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dalam Mendukung Prioritas Nasional ke-7 yaitu pada Kegiatan Prioritas ke-4 yaitu “Penguatan Ekosistem Digital Pelayanan Publik”.
2. Penguatan Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral, dalam Mendukung Prioritas Nasional ke-7 yaitu pada Kegiatan Prioritas ke-9 yaitu “Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan”.
3. Publikasi/Laporan Penyusunan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dalam Mendukung Prioritas Nasional ke-7 yaitu pada Kegiatan Prioritas ke-4 yaitu “Penguatan Ekosistem Digital Pelayanan Publik”.
4. Laporan Kerja Sama OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Bidang Statistik, dalam Mendukung Prioritas Nasional ke-2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, pada Kegiatan Prioritas ke-6 yaitu “Proses Akses Indonesia ke OECD”.

Sementara itu, dalam kerangka pengendalian pembangunan dan reformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan transformasi digital Rancangan Awal RPJMN 2025–2029,

khususnya pada bagian tata kelola data pembangunan, Direktorat STPHP memosisikan diri sebagai pembina statistik sektoral sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pada pembinaan statistik, Direktorat STPHP memprioritaskan penyediaan data prioritas pemerintah (baik oleh BPS maupun Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait) yang terstandar, memiliki metadata dan kode referensi serta dapat dibagipakaikan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat STPHP untuk tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2025–2029, Direktorat STPHP menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*output*) dari program Direktorat STPHP. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 – 2029**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan.						
	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas.	Persentase publikasi/laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas.	100	100	100	100	100
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif dan Efisien.						
	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75	80	85	90	100

### 2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025

Untuk mempermudah tercapainya visi dan misi di atas, maka ditentukan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 beserta sasaran strategis dan indikatornya seperti disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025**

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan			
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persentase publikasi/laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas	Persen	100
Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif dan Efisien			
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75

## 2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

### 2.4.1 Dukungan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Prioritas Nasional (Pembinaan Statistik Sektoral)

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan

kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai Pembina tujuh Kementerian/Lembaga mitra binaan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

#### **2.4.2 Dukungan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Prioritas Presiden (Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah)**

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (*sampling*) menggunakan CAPI. Sebanyak 281.817 titik amatan dipantau setiap bulan oleh 7.572 petugas dengan metode pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, Survei Ubinan Padi dilakukan untuk memperoleh data produktivitas melalui pengukuran langsung pada 78.626 sampel plot ubinan, dilaksanakan setiap empat bulan oleh petugas BPS. Survei ubinan padi menggunakan pendekatan area berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) dengan menggunakan titik pengamatan pada subsegmen KSA sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas.

#### **2.4.3 Dukungan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Isu Strategis Nasional (Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas)**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional. Neraca Komoditas adalah sistem data terintegrasi yang memuat informasi produksi dan konsumsi komoditas tertentu secara nasional untuk periode waktu



tertentu, berfungsi sebagai dasar penerbitan izin ekspor-impor, acuan pengembangan industri, serta data bagi pelaku usaha, yang bertujuan untuk membuat proses perdagangan lebih transparan dan berbasis data. Perpres Nomor 7 Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas, yang mengatur koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas pangan (gula, garam, jagung, beras, daging sapi, perikanan, bawang putih) dan non-pangan menggunakan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) dalam kerangka *Indonesia National Single Window (INSW)* untuk mempercepat perizinan ekspor-impor. Peraturan ini memperbarui kerangka kerja untuk pengawasan dan pengendalian komoditas strategis di bawah koordinasi Menko Pangan dan Menko Perekonomian.

a. Peran dalam mendukung Neraca Komoditas Beras

- Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam menghasilkan data luas panen dan produksi padi/beras nasional adalah Pendataan Kerangka Sampel Area Padi (KSA Padi). KSA Padi adalah suatu metode hasil kolaborasi BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sekarang bergabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Namun, mulai tahun 2020, tanggung jawab pelaksanaan KSA Padi telah sepenuhnya beralih ke BPS. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data yang konvensional menjadi lebih obyektif, ilmiah, dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.
- Pendataan KSA Padi mengintegrasikan teknologi modern seperti citra satelit dan aplikasi seluler android untuk observasi lapangan sehingga diperoleh data luas panen dan potensi luas panen yang objektif, akurat dan ilmiah. Pendataan KSA tidak hanya menghitung luas panen, tetapi juga memantau fase pertumbuhan tanaman (vegetatif, generatif, panen, persiapan lahan, dan lainnya), informasi tersebut sangat berguna untuk mengidentifikasi pola pertanaman padi. Hasil kegiatan ini dapat mendukung perencanaan kebijakan pertanian.
- Dalam kegiatan pengamatan lapangan, petugas lapangan menggunakan *smartphone* yang dilengkapi dengan aplikasi *Android* yang secara khusus dikembangkan untuk survei KSA. Petugas akan mengunjungi titik segmen sesuai dengan koordinat lokasi titik segmen yang menjadi wilayah tugas masing-masing petugas, mengamati fase amatan, dan kemudian mengambil foto di titik segmen tersebut. Informasi fase pertumbuhan padi dan foto amatan kemudian dikirim langsung oleh petugas dengan menggunakan koneksi internet. Prosedur ini dapat

meminimalisir subjektivitas dalam menentukan fase tumbuh padi. Setiap petugas mengamati 9 titik di setiap segmen terpilih.

- Nilai amatan yang dimasukkan dari hasil observasi lapangan meliputi 8 jenis amatan, yaitu vegetatif 1, vegetatif 2, generatif, panen, persiapan lahan, puso, lahan pertanian untuk komoditas lain, dan bukan lahan pertanian. Setelah melalui pengembangan dan evaluasi, pada tahun 2020 ditambahkan satu nilai amatan lagi, yaitu 'tidak dapat diakses' untuk mengakomodir nilai sub-segmen yang tidak dapat dikunjungi karena masalah perizinan ataupun kesulitan akses menuju wilayah pengamatan.
- Secara teknis, penentuan fase tumbuh padi oleh petugas di lapangan dilakukan berdasarkan ciri-ciri fisik dari tanaman padi tersebut. Misalnya, fase tumbuh padi vegetatif 1 ditentukan berdasarkan ciri tanaman yang belum rimbun, jarak antara tanaman yang masih renggang, masih terlihat tubuh air di sela-sela antar tanaman pada jarak tanam normal, sementara itu penentuan fase vegetatif 2 berdasarkan ciri-ciri jarak antar tanaman yang sudah tidak terlihat jelas dan tanaman sudah rimbun (hingga mencapai anakan maksimum).
- Untuk meminimalisir kesalahan petugas dalam menentukan fase tumbuh tanaman padi, di dalam pelaksanaan KSA juga terdapat petugas pengawas. Di samping memantau *progress* pengumpulan data di setiap wilayah tugas petugas yang diawasi, pengawas juga bertugas memeriksa kesesuaian antara nilai amatan dan foto yang dikirimkan oleh petugas melalui aplikasi *Android* ataupun *website* KSA. PMS kemudian memberikan *feedback* terkait hasil pemeriksaan kepada petugas lapangan.

b. Peran dalam mendukung Neraca Komoditas Jagung

- Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam menghasilkan data luas panen dan produksi jagung adalah Pendataan Kerangka Sampel Area Jagung (KSA Jagung). Pada 2018, BPS telah merilis data produksi padi/beras nasional dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan telah dirilisnya data produksi beras tersebut yang diyakini lebih akurat, maka mendorong untuk dilakukan perbaikan data produksi komoditas strategis lainnya, yaitu jagung. Sejak 2019, BPS telah mengimplementasikan metode KSA untuk komoditas jagung.
- Pada 2025, kegiatan KSA Jagung secara penuh menjadi tanggung jawab BPS mulai dari pelaksanaan sekaligus pengembangannya. Proses alih pengetahuan (*knowledge transfer*) dari BRIN kepada BPS dan transisi pengelolaan sistemnya sudah dimulai sejak 2023.
- Pendataan KSA jagung mengintegrasikan teknologi modern seperti citra satelit dan aplikasi seluler android untuk observasi lapangan sehingga diperoleh data luas panen dan potensi luas panen yang objektif, akurat dan ilmiah. Pendataan KSA tidak hanya menghitung luas panen, tetapi juga memantau fase pertumbuhan tanaman



(vegetatif, generatif, panen, persiapan lahan, dan lainnya), informasi tersebut sangat berguna untuk mengidentifikasi pola pertanaman jagung. Hasil kegiatan ini dapat mendukung perencanaan kebijakan pertanian.

- Untuk pengamatan lapangan KSA jagung sama dengan KSA padi namun titik yang diamati lebih sedikit dari pada padi yaitu setiap petugas mengamati 4 titik di setiap segmen terpilih. Fase tumbuh jagung yang diamati meliputi fase vegetatif awal (VA), Vegetatif akhir (VR), Reproduksi awal (RA), Reproduksi akhir (RR), Panen hijau (PH), Panen Muda (PM), Panen Pipilan (PP), Persiapan Lahan (PL), Bukan Jagung, Bukan Lahan Pertanian, Potensi rusak/puso, Bera, dan Tidak dapat diakses.
- c. Peran dalam mendukung Neraca Komoditas Bawang Putih
- Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam menghasilkan data statistik hortikultura untuk komoditas bawang putih adalah Pendataan Laporan Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). Pengelolaan SPH (Statistik Pertanian Hortikultura) di tingkat pusat dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Kementerian Pertanian. Pengelolaan Statistik Hortikultura terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya, pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Pengumpulan data hortikultura mencakup seluruh wilayah di Indonesia dengan unit terkecil kecamatan. Jumlah Cakupan Komoditas SPH Adalah 88 dari 520 Komoditas Binaan Ditjen Hortikultura dan yang dikumpulkan dalam SPH sebanyak 88 komoditas.
  - Pengumpulan data hortikultura disesuaikan dengan Buku Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura. Proses pengelolaan data hortikultura melibatkan beragam pihak mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Struktur organisasi di tingkat kecamatan adalah petugas pengumpul data, di tingkat Kabupaten terdiri atas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, di tingkat Provinsi terdiri atas Dinas Pertanian Provinsi dan BPS Provinsi, dan di tingkat Pusat terdiri dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Pusdatin Kementerian Pertanian, dan BPS. Petugas pengumpul data di kecamatan meliputi, KCD (Kepala Cabang Dinas), PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Petugas Data, dan BPP (Balai Penyuluh Pertanian).
  - Adapun gambaran singkat mengenai kegiatan SPH yaitu sebagai berikut.
    - ✓ Tujuan: Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan.

## PENJELASAN UMUM

### SEJARAH SINGKAT

**Sebelum 1970:** Pengumpulan data statistik pertanian dilakukan oleh BPS dan Departemen Pertanian dengan metode berbeda, menyebabkan perbedaan kepentingan.

**1970-1994:** BPS, Bappenas, dan Departemen Pertanian membentuk tim untuk meningkatkan kualitas data pertanian dengan melibatkan pemerintah daerah.

**1995-2007:** Diberlakukan buku Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menyempurnakan metode pengumpulan dan pengolahan data, yang masih dikelola bersama.

**2007-sekarang:** Pedoman dipisahkan menjadi dua buku pedoman yaitu Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Tanaman Pangan, serta Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura. Pada 2020, pedoman hortikultura direvisi akibat perubahan cakupan komoditas dan daftar isian.

### VARIABEL/INDIKATOR UTAMA YANG DIHASILKAN

- Luas panen
- Luas penanaman baru/jumlah penanaman baru
- Luas tanaman rusak/puso
- Produksi
- Jumlah tanaman menghasilkan/tidak menghasilkan
- Rata-rata harga di tingkat petani

### PRODUK DISEMINASI

Rilis BRS : Tidak      Rilis publikasi : Ya

Periode rilis BRS : -      Periode rilis publikasi : Tahunan

- ✓ Cakupan:
  - a. SPH Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim : Bulanan
  - b. SPH Tanaman Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan : Tahunan
  - c. SPH Tanaman Biofarmaka dan Tanaman Hias : Triwulanan
  - d. Survei Perusahaan Hortikultura : Tahunan

Untuk bawang putih termasuk pada cakupan SPH Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim : Bulanan

## Jenis Data yang Dikelola dalam Kegiatan SPH

### 01 Luas Pertanaman

- Luas Panen Habis/Dibongkar
- Luas Panen Belum Habis
- Luas Rusak/Tidak Berhasil/Puso
- Luas Penanaman Baru/Tambah Tanam
- Luas Tanaman Akhir periode Laporan

### 02 Jumlah Tanaman

- Tanaman yang Dibongkar/Ditabung
- Tanaman Baru/Penanaman Baru
- Jumlah Tanaman Akhir Periode Laporan
- Tanaman Belum Menghasilkan
- Tanaman Produktif yang sedang Menghasilkan
- Tanaman Taw / Rusak

### 03 Jumlah Produksi

- Produksi Dipanen Habis/ Dibongkar
- Produksi Belum Habis (Kuintal)

### 04 Harga

Rata-rata Harga Jual di Petani

- ✓ Metode pengumpulan data:
  - a. Pendataan lengkap meliputi seluruh kecamatan di Indonesia.
  - b. Data berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.
  - c. Penambahan/Pengurangan cakupan/sampel mengikuti pemekaran wilayah administrasi provinsi, kabupaten/kota, dan atau kecamatan.
- ✓ Ruang Lingkup: Seluruh wilayah di Indonesia dengan unit terkecil adalah kecamatan yang terdiri dari cakupan pelaku usaha Rumah Tangga maupun Perusahaan yang bergerak di budidaya komoditas hortikultura di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 7.263 kecamatan.

## METODOLOGI

### CAKUPAN KEGIATAN

**Cakupan populasi** : Seluruh wilayah di Indonesia dengan unit terkecil kecamatan

**Cakupan wilayah** : 38 Provinsi, 514 Kab/Kota

**Cakupan komoditas** : Terdiri dari 88 jenis komoditas hortikultura, meliputi komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat.

### CARA PENGUMPULAN

Sensus (*complete enumeration*), pelaksanaan SPH merupakan kerjasama antara BPS dengan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan

### DESAIN SAMPLING

**Kerangka sampel** : +

**Metode sampling** : -

**Jumlah sampel** : +

### PERIODE PENDATAAN

- SPH-SBS: Bulanan
- SPH -BST, SPH -TBF, dan SPH -TH: Triwulanan

### METODE PENDATAAN

Pengumpulan data hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Pengumpul Data Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di seluruh Kecamatan di Indonesia.

Data berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan/perkiraan pengamatan lapang (*eye estimates*)

### PENYAJIAN DATA

**Periode penyajian** : Tahunan

**Level penyajian terendah** : Kecamatan

**Status angka** : Angka sementara, Angka Tetap

### MODA PENDATAAN

PAPI (*Pencil and Paper Interviewing*)

### JUMLAH PETUGAS

Sekitar 7000 petugas pengumpul data

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala dengan beberapa solusi yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

## GAMBARAN KUALITAS DATA, TANTANGAN, DAN TIMELINE KEGIATAN

### GAMBARAN KUALITAS DATA

**Response rate** : Absensi diatas 97% di Tahun 2024 untuk seluruh jenis formulir SPH

**Relative standard error (RSE)** : -

### Timeline 2025

- Januari 2025
- Jan - Des 2025
- Jan - Des 2025
- Jan - Des 2025
- Jan - Des 2025
- Februari 2025
- Februari 2025
- Februari 2025

### KENDALA DAN TANTANGAN KEGIATAN

- Organisasi**: Keterlambatan pengiriman dokumen SPH dan belum adanya unit khusus pengelolaan data di Dinas Pertanian, sehingga masih membutuhkan dukungan dari BPS.
- SDM**: Beban kerja tinggi dengan cakupan luas, jumlah petugas terbatas, sering terjadi pergantian petugas, serta kualitas petugas yang bervariasi.
- Metodologi**: Data berasal dari kompilasi administrasi, sehingga masih memiliki kelemahan dalam ketepatan hasil.
- Geografis**: Pengiriman laporan fisik tidak efektif, wilayah survei luas terutama di daerah terpencil
- Biaya**: Anggaran pusat menurun, distribusi form SPH di daerah sulit, serta anggaran pelatihan SDM terbatas.
- Validitas**: Sering terjadi kesalahan input; *contact person* sulit dihubungi/proses konfirmasi kesalahan dokumen membutuhkan waktu yang lama; validasi manual cukup menyulitkan petugas.

### PROSES KEGIATAN

- PERSIAPAN**
  - Pencetakan Kuesioner dan pengiriman dokumen ke seluruh Kecamatan
- PENGUMPULAN DATA**
  - Pondataan oleh dinas pertanian
  - Pengawasan/Pemeriksaan oleh bps
  - Supervisi
- PENGOLAHAN DATA**
  - Entri Data di BPS Kab/Kota
- DISEMINASI DAN EVALUASI**
  - SPH ASEM (Angka Sementara)
  - SPH ATAP (Angka Tetap)
  - Publikasi

### CONTOH DOKUMENTASI KEGIATAN

## INOVASI YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN

### INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN

**Peningkatan teknologi Informasi** : Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengolahan dan Pengiriman Data SPH mencakup beberapa perubahan signifikan dari sistem lama ke sistem yang lebih efisien.

**Interoperabilitas data BPS-Kementan** : Pengiriman data BPS-Kementan sudah dilakukan secara harian setiap pukul 22.00 WIB by sistem menggunakan teknologi SSIS (SQL Server Integration Service).

### INOVASI YANG MASIH DAN AKAN DILAKUKAN

**SPH-CAWI (Computer Aided Web Interviewing)** : SPH CAWI merupakan MODUL dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH.

**Survei Indeks Produksi Hortikultura** : Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara triwulanan untuk mengukur perkembangan produksi subsektor hortikultura di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mengontrol kualitas data SPH yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian serta mendukung penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.

### INTEROPERABILITAS DATA

**Sebelum**  
(Desember 2019 – Februari 2022)

Sebelumnya, BPS mengirimkan database hasil pengolahan SPH online setiap tanggal 15, 20 dan 25 ke Pusdatin, Kementan untuk dilakukan evaluasi oleh petugas Kabupaten dan Provinsi melalui aplikasi e-PDPS atau SIPEDAS

**Sesudah**  
(Februari 2022 - Sekarang)

Saat ini, pengiriman data sudah dilakukan secara harian setiap pukul 22.00 WIB menggunakan teknologi SSIS (SQL Server Integration Service).

SPH CAWI akan diimplementasikan oleh KEMANTAN di TA.2026

Survei Indeks Produksi Hortikultura akan dilaksanakan oleh BPS di TA.2026

## 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mendapatkan pagu sesuai Perjanjian Kinerja PPIS sebesar Rp 5.804.569.000,-. Namun sejak awal tahun terhadap rasionalisasi anggaran kondisi pagu per agustus 2025 dan Desember 2025 mengalami perubahan. Untuk pagu kondisi Agustus 2025 pagu yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp 1.101.403.000,- atau mengalami rasionalisasi sebesar 81,02% jika dibandingkan dengan nilai pagu kondisi perjanjian kinerja (dapat dilihat pada tautan <https://drive.bps.go.id/s/dWgxIieAjcnLpf2>) dan Link pagu kondisi 31 Desember 2025 nilai pagu total per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp.1.041.403.000,- atau jika dibandingkan dengan nilai pagu perjanjian kinerja mengalami rasionalisasi sebesar 82,05% (dapat dilihat pada tautan <https://drive.bps.go.id/s/TYHam8cDgzjm3gL>). Pada tautan tersebut kondisi. Pagu awal dan pagu anggaran yang bisa digunakan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan tahun 20 Pagu awal dan pagu anggaran yang bisa digunakan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pagu Awal dan Pagu yang bisa Digunakan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025

Nama kegiatan	Pagu Awal (Perjanjian Kinerja) (Rp)	Lock Pagu/ Rasionalisasi Anggaran (Rp)	Pagu Akhir yang dapat digunakan (Laporan Daya Serap 31 Desember 2025) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.804.569.000	4.763.166.000	1.041.403.000
<b>Total</b>	<b>persentase lock pagu 53,56 persen)</b>		<b>1.041.403.000</b>



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP) merupakan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, serta analisis kinerja dan perwujudan kewajiban Direktorat STPHP untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Direktorat STPHP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Direktorat STPHP mempunyai tugas melaksanakan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pengukuran Kinerja untuk memonitor pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya dapat meningkat. Analisis capaian kinerja yang disajikan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 2025
2. Capaian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Terhadap Target Renstra
3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025
4. Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

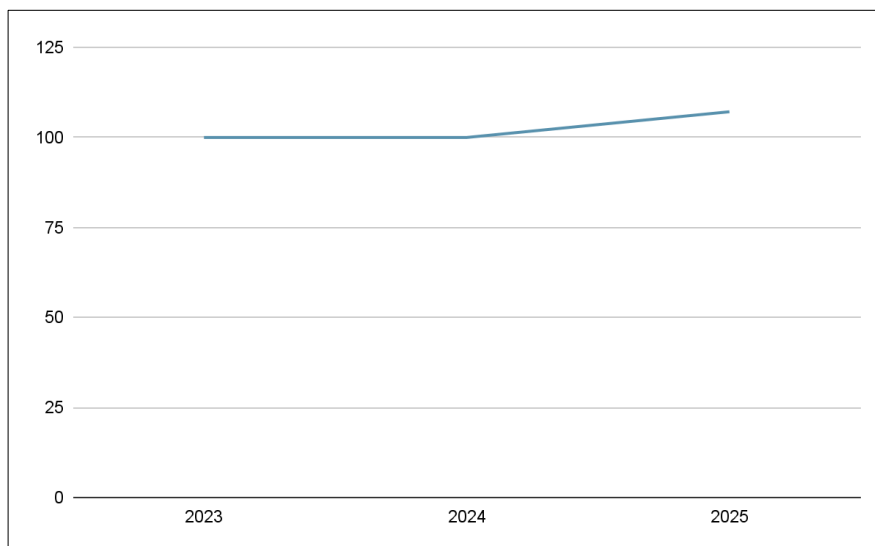
Selain informasi analisis capaian kinerja, laporan ini juga menyajikan informasi mengenai prestasi dan inovasi, serta realisasi dan efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2024.

#### **3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025**

##### **3.1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2023–2025**

Untuk pencapaian kinerja tahun 2025 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhadap target Penetapan Kinerja yang ditetapkan setiap awal tahun berada di

atas 107,14 persen. Perkembangan capaian kinerja tahun 2023–2025 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan disajikan pada Gambar 3.1 berikut.



**Gambar 3.1 Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025**

Berdasarkan Gambar 3.1, rata-rata capaian kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2023 dan 2024 mencapai sekitar 100,00 persen, kemudian meningkat menjadi 107,14 pada tahun 2025. Jumlah indikator tahun 2023 sama dengan tahun 2024, hanya pada tahun 2024 ada indikator tambahan sebagai penunjang capaian kinerja suplemen sebanyak 5 indikator. Pada tahun 2025, jumlah indikator sebanyak 2 indikator. Realisasi capaian kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2023–2025**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja (%)		
				2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
1.	Sasaran 1. Meningkatnya ketersediaan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas	Jumlah aktivitas Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang mempublikasikan nilai akurasi	Aktivitas	100,00	100,00	
2.		Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	Publikasi/ Laporan	100,00	100,00	



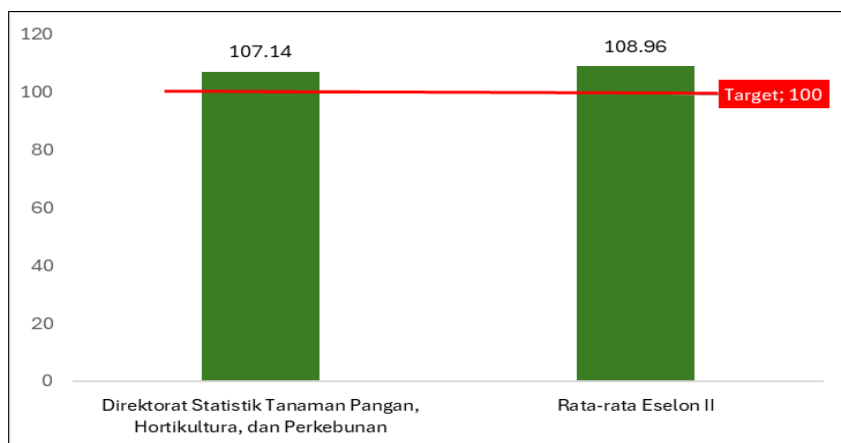
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja (%)		
				2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.		Jumlah instansi yang menggunakan data statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan	Instansi	100,00	100,00	
Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melalui Sistem Statistik Nasional						
4.	Sasaran 2. Penguatan komitmen K/L terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah aktivitas pembinaan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dilakukan di K/L/D/I	Aktivitas	100,00	100,00	
5.		Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance kepada Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Instansi	100,00	100,00	
Tujuan 3. Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan <i>Insight</i> yang relevan						
	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya penyediaan data dan <i>Insight</i> statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas	Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen			100
Tujuan 4. Mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien						
	Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lemba ga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas	Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin			114,28
Rata – Rata Capaian Kinerja				100,00	100,00	107,14

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan indikator kinerja utama berdasarkan periode Renstra 2020-2024 dan 2025-2029. Indikator pada tahun 2023-2024 diukur dalam satuan jumlah sedangkan untuk tahun 2025 diukur dalam satuan persen dan poin. Sehingga narasi indikator tahun 2025 mengalami perubahan menjadi “Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan” dan “Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan”.

### 3.1.2 Nilai Predikat Kinerja Organisasi (PKO) 2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berhasil memperoleh nilai Predikat Kinerja Organisasi (PKO) sebesar 94,5% yang dikategorikan dalam predikat "Baik" sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024. Pencapaian ini merefleksikan efektivitas unit kerja dalam merealisasikan target-target strategis serta menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun. Predikat "Baik" ini sekaligus mengindikasikan bahwa organisasi telah berhasil merealisasikan hampir seluruh indikator kinerja utama yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan dengan sangat efektif.

### 3.1.3 Benchmarking capaian kinerja terhadap rata-rata Eselon II tahun 2025



**Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Berdasarkan gambar diatas, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon II (Deputi Bidang Statistik Produksi). Namun dalam aspek perencanaan STPHP lebih mendekati target 100 persen. Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah mengidentifikasi upaya peningkatan kinerja yang dapat diterapkan, yaitu Direktorat STPHP telah melakukan pendampingan secara maksimal namun, Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus pembinaan banyak yang mengampu kegiatan

prioritas sehingga mempunyai keterbatasan waktu untuk melakukan pembahasan secara intens terkait dengan pembinaan statistik sektoral pada K/L masing-masing.

### 3.1.4 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Tabel 3. 2 Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran 2023-2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Meningkatkan ketersediaan data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas.										
Jumlah aktivitas Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang mempublikasikan nilai akurasi	Aktivitas	2	2	N/A (Belum dijadikan indikator)	2	2	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)
Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	Publikasi	22	22	N/A (Belum dijadikan indikator)	22	22	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)
Jumlah instansi yang menggunakan data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan	Instansi	27	27	N/A (Belum dijadikan indikator)	27	27	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)
Sasaran 2. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I										
Persentase aktivitas pembinaan Statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan	Persen	100	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100	100	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)
Persentase K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	60	80	N/A (Belum dijadikan indikator)	60	80	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00	100,00	N/A (Belum dijadikan indikator)
Sasaran 3 :Terwujudnya penyediaan data dan <i>Insight</i> statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas										
Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen	N/A (Tidak dijadikan indikator)	N/A (Tidak dijadikan indikator)	100,00	N/A (Tidak dijadikan indikator)	N/A (Tidak dijadikan indikator)	100,00	N/A (Tidak dijadikan indikator)	N/A (Tidak dijadikan indikator)	100,00

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 3: Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas										
Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	N/A (Tidak diadikatkan indikator)	N/A (Tidak diadikatkan indikator)	75	N/A (Tidak diadikatkan indikator)	N/A (Tidak diadikatkan indikator)	85,71	N/A (Tidak diadikatkan indikator)	N/A (Tidak diadikatkan indikator)	114,28

### 3.1.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai dua tujuan dan dua sasaran strategis. Tujuan pertama yaitu “Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan *Insight* yang relevan” dengan sasaran strategis “Terwujudnya penyediaan data dan *Insight* statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas”. Kemudian untuk tujuan kedua yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien” dengan sasaran strategis “Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas”.

Capaian kinerja utama Direktorat STPHP tahun 2025 dapat dilihat dari keberhasilan melaksanakan tujuan serta sasaran strategis Direktorat STPHP yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, yang diukur dengan beberapa indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran seluruh indikator, capaian kinerja utama Direktorat STPHP mencapai tujuan dan sasaran dengan rata-rata 107,14 persen. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Utama Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan <i>Insight</i> yang relevan					
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya penyediaan data dan <i>Insight</i> statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas	Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen	100	100	100,00
Tujuan 2. Mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien					



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas	Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75	85,71	114,28
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Utama</b>		<b>107,14</b>			

### Capaian Kinerja Tujuan Pertama dan Sasaran Strategis Pertama

Tujuan pertama adalah “Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan *Insight* yang relevan”. Direktorat STPHP berkomitmen menyediakan statistik berkualitas dan *insight* relevan sebagai fondasi kebijakan berbasis bukti. Data yang akurat tidak hanya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat peran strategis, independensi, dan keandalan lembaga dalam pengambilan keputusan. Tujuan pertama dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya penyediaan data dan *Insight* statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas”, yang diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu “Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan”. Dari hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 100 persen. Dengan demikian, nilai capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dikatakan berhasil. Secara rinci, analisis dan evaluasi atas masing-masing indikator kinerja sasaran dijelaskan di bawah ini.

#### IKS 1.2.1.1 : Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Tabel 3. 4 Capaian IKS Utama 1.2.1.1 Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.1.1 Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen	100	100	100,00

Indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis pertama yaitu “persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas”. Berdasarkan Surat Plt. Sestama Nomor B-600/02000/PR.613/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang

Penyampaian Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 sebagai Rujukan dalam Penghitungan Realisasi Kinerja Triwulan III dan IV 2025, disampaikan bahwa hasil PSB Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar 4,48 (Domain Kualitas data) dan 3,67 (Aspek Pemanfaatan Data Statistik) sehingga memperoleh predikat berkualitas. Dengan demikian seluruh publikasi yang dihasilkan Tahun 2025 yaitu sebanyak 55 publikasi yang terdiri dari 9 publikasi ARC, 2 publikasi NonARC, dan 44 BRS juga berkualitas. Namun pada Triwulan III dan IV tahun 2025 terdapat penambahan publikasi NonARC sebanyak 2 publikasi sehingga jumlah publikasi yang dihasilkan tahun 2025 sebanyak 57 publikasi, yang terdiri dari 9 publikasi ARC, 4 publikasi NonARC, dan 44 BRS. Alasan penambahan publikasi ini dikarenakan adanya kebutuhan stakeholder terkait data statistik tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan melalui website. Publikasi tambahan yang dimaksud adalah: Luas Panen dan Produksi Jagung Indonesia yang digunakan oleh Polri untuk mengawal swasembada pangan (jagung) dan Analisis Produktivitas Padi di Indonesia yang digunakan oleh Kemenko Pangan sebagai bahan kebijakan terkait pupuk subsidi. Indikator tersebut dihitung melalui persamaan sebagai berikut:

Metode Penghitungan	
$y = \frac{n}{N} \times 100\%$	
<p><i>Ket:</i></p> <p>y = Persentase Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas</p> <p>n = Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas</p> <p>N= Jumlah seluruh Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dihasilkan.</p>	

**Tabel 3. 5 Daftar Publikasi/BRS Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025**

No (1)	Judul Publikasi/BRS (2)	Jadwal Terbit (3)
1	Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2024 (Angka Tetap) (ARC)	9 Mei 2025
2	Statistik Hortikultura 2024 (ARC)	10 Juni 2025
3	Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2024 (ARC)	15 Agustus 2025
4	Direktori Perusahaan Perkebunan Karet Indonesia 2024 (ARC)	29 Agustus 2025
5	Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2024 (ARC)	29 Agustus 2025
6	Statistik Tanaman Perkebunan Semusim Indonesia 2024 (Tebu dan Tembakau) (ARC)	29 Agustus 2025
7	Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia 2024 (Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Karet, Teh, dan Komoditas Perkebunan Unggulan) (ARC)	29 Agustus 2025
8	Indikator Pertanian 2024 (ARC)	17 Oktober 2025
9	Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2025 (ARC)	17 Oktober 2025
10	Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) 2024 (Non ARC)	17 Maret 2025
11	Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL) 2024 (Non ARC)	17 Maret 2025
12	BRS Luas Panen dan Produksi Padi ATAP 2024	3 Februari 2025
13	BRS Luas Panen dan Produksi Padi ATAP 2024 English	3 Februari 2025



No	Judul Publikasi/BRS	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
14	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung ATAP 2024	3 Februari 2025
15	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung ATAP 2024 English	3 Februari 2025
16	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Januari 2025)	3 Maret 2025
17	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Januari 2025) English	3 Maret 2025
18	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Januari 2025)	3 Maret 2025
19	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Januari 2025) English	3 Maret 2025
20	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Februari 2025)	8 April 2025
21	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Februari 2025) English	8 April 2025
22	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Februari 2025)	8 April 2025
23	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Februari 2025) English	8 April 2025
24	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Maret 2025)	2 Mei 2025
25	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Maret 2025) English	2 Mei 2025
26	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Maret 2025)	2 Mei 2025
27	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Maret 2025) English	2 Mei 2025
28	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan April 2025)	2 Juni 2025
29	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan April 2025) English	2 Juni 2025
30	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan April 2025)	2 Juni 2025
31	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan April 2025) English	2 Juni 2025
32	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Mei 2025)	1 Juli 2025
33	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Mei 2025) English	1 Juli 2025
34	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Mei 2025)	1 Juli 2025
35	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Mei 2025) English	1 Juli 2025
36	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juni 2025)	1 Agustus 2025
37	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juni 2025) English	1 Agustus 2025
38	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juni 2025)	1 Agustus 2025
39	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juni 2025) English	1 Agustus 2025
40	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juli 2025)	1 September 2025
41	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Juli 2025) English	1 September 2025
42	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juli 2025)	1 September 2025
43	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Juli 2025) English	1 September 2025
44	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Agustus 2025)	1 Oktober 2025
45	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Agustus 2025) English	1 Oktober 2025
46	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Agustus 2025)	1 Oktober 2025
47	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Agustus 2025) English	1 Oktober 2025
48	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan September 2025)	3 November 2025
49	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan September 2025) English	3 November 2025
50	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan September 2025)	3 November 2025
51	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan September 2025) English	3 November 2025
52	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Oktober 2025)	1 Desember 2025
53	BRS Luas Panen dan Produksi Padi (KSA Amatan Oktober 2025) English	1 Desember 2025
54	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Oktober 2025)	1 Desember 2025

No	Judul Publikasi/BRS	Jadwal Terbit
(1)	(2)	(3)
55	BRS Luas Panen dan Produksi Jagung (KSA Amatan Oktober 2025) English	1 Desember 2025
56	Luas Panen dan Produksi Jagung di Indonesia 2024 (Non ARC)	15 Agustus 2025
57	Analisis Produktivitas Padi di Indonesia 2024 (Hasil Survei Ubinan) (Non ARC)	1 Oktober 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa pencapaian telah mencapai target dengan persentase capaian kinerja mencapai 100 persen. Namun, dalam mencapai kinerja tersebut masih terdapat **kendala** yang dihadapi, yaitu:

1. Dampak bencana banjir di Aceh mengakibatkan petugas KSA belum bisa ke lapangan (Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie Jaya).
2. Masih ada beberapa *rule* validasi pada aplikasi fasih yang perlu diperbaiki.
3. Terdapat beberapa perubahan pada kuesioner sehingga membutuhkan penyesuaian pada *rule* validasi dan aplikasi dan evaluasi ketersediaan dan dukungan anggaran TA 2026 yang ada dengan level estimasi yang diharapkan mengalami efisiensi.
4. Survei Komstrat Perkebunan: Ada beberapa hasil estimasi data Komstrat 2025 yang masih perlu dikonfirmasi; Penyesuaian *layout* laporan Komstrat 2025 (ulasan, grafik dan lampiran).
5. Survei Perusahaan Perkebunan: *Respon rate* Survei Perusahaan Perkebunan belum optimal, Terdapat data Angka Sementara 2025 PBN dan PBS yang masih perlu dikonfirmasi ke provinsi/perusahaan; Terdapat masukan dari Ditjenbun, PBN dan PBS sehingga kuesioner Sedapp 2026 perlu disesuaikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Direktorat STPHP melakukan beberapa **upaya atau solusi** yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kabupaten melaporkan hasil amatan menggunakan form excel, kemudian IPD import ke *database*.
2. Melakukan koordinasi dan pembahasan internal, bukti: <https://drive.bps.go.id/s/z9n7dH93C8xTgYF>
3. Berkoordinasi dengan tim SIS, tim PMSS dan Biroren, bukti: <https://drive.bps.go.id/s/cfg3wqw88TZCwrZ>.
4. Survei Komstrat Perkebunan: Melakukan koordinasi dan konfirmasi data hasil estimasi Komstrat 2025 ke Direktorat PMSS; Layout diperbaiki sesuai publikasi yang pernah dibuat sebelumnya.
5. Survei Perusahaan Perkebunan: Melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi dan perusahaan untuk peningkatan *respon rate*; Membagi komoditas perkebunan kepada beberapa PIC tim perkebunan untuk melakukan konfirmasi data Angka Sementara 2025 PBN dan PBS; Dilakukan penyelarasan kuesioner Sedapp Online 2026 sesuai masukan dari Ditjenbun, PBN, dan PBS.



Adapun **upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yaitu sebagai berikut:

1. Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan
2. Setelah koordinasi dengan tim terkait terlaksana, maka rencana berikutnya melakukan pembahasan persiapan instrumen, *timeline* kegiatan, dan sosialisasi ke daerah terkait persiapan Indeks Produksi bersama tim SIS, PMSS, dan Roren
3. Survei Komstrat Perkebunan: Solusi sudah ditindaklanjuti pada triwulan berjalan
4. Survei Perusahaan Perkebunan: Melakukan sosialisasi kuesioner sedapp online 2026 dengan Ditjenbun; Melakukan *refreshing*/pelatihan Survei Perusahaan Perkebunan ke BPS Provinsi dan Perusahaan

**IKS 2.2.1.1 : Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

**Tabel 3. 6 Capaian IKS Utama 2.2.1.1 Tahun 2025**

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.1 Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75	85,71	114,28

**Indikator kinerja sasaran** pada **sasaran strategis kedua** yaitu “tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral direktorat statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan”. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana BPS berperan sebagai pembina Data Statistik. Sebagai pembina data statistik, tugas yang harus dilaksanakan mencakup penetapan standar data statistik, penyusunan struktur baku metadata statistik, serta pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk menghasilkan statistik sektoral yang berkualitas guna mendukung ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan. Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut:

### Metode Penghitungan

$$y = 0,8x_1 + 0,2x_2$$

Ket:

y = Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral

$x_1$  = Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Standar

$x_2$  = Normalisasi Kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam penyelenggaraan statistik Sektoral

$$x_2 = \frac{G_t - \text{Min}}{\text{Max} - \text{Min}}$$

Ket:

$G_t$  = Persentase Kenaikan Rata-Rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat

Min = 0

Max = Kenaikan maksimal dari Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra tahun 2023 ke Target RPJMN 2029 dengan nilai 3,17

$$G_t = \frac{A_t - A_0}{A_0} \times 100$$

Ket:

$A_t$  = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun ke-t

$A_0$  = Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Direktorat pada tahun dasar (2023)

Adapun K/L yang menjadi mitra pembinaan statistik sektoral oleh Direktorat STPHP pada tahun 2025 adalah:

1. Kementerian Pertanian (Kementan)
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN)
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
6. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa pencapaian telah mencapai target dengan persentase capaian kinerja mencapai 100 persen. Namun, dalam mencapai kinerja tersebut masih terdapat **kendala** yang dihadapi, yaitu pemahaman terhadap materi pembinaan belum dapat dipahami secara optimal karena materi disampaikan secara online.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Direktorat STPHP melakukan **upaya atau solusi** yaitu melakukan penguatan materi yang disampaikan pada triwulan III untuk beberapa K/L yang menjadi tanggung jawab Direktorat STPHP secara *offline* (BPK, Bapanas, Kemen ATR/BPN).

Adapun upaya perbaikan/rencana tindak lanjut IKS 2.2.1.1 yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi hasil pembinaan triwulan IV 2025 untuk lokus pembinaan tahun 2025 (Kementan dan Kemen-ATR/BPN).
2. Menyusun *timeline* pembinaan statistik sektoral tahun 2026 untuk lokus Kementan, Kemen-ATR/BPN, dan KPPU.
3. Melakukan pembinaan statistik sektoral series 1.

### 3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhadap Target Renstra

Pada tahun 2025, Direktorat STPHP telah menetapkan target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut. Secara umum, Direktorat STPHP berhasil mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 107,14% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target jangka menengah yang direncanakan dalam Renstra 2025-2029 telah berhasil dicapai. Rincian capaian setiap indikator disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.7 Realisasi Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2025**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
Sasaran 1. Terwujudnya penyediaan data dan <i>insight</i> statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas					Target tercapai	Target tercapai
Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen	100	100	100	100	100
Sasaran 2. Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas					Target tercapai	Target belum tercapai
Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75	100	85,71	114,28	85,71

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program kerja yang dilaksanakan serta koordinasi yang baik antar unit kerja dalam menyediakan data dan *insight* statistik yang berkualitas dan pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat STPHP yang berkualitas. Meskipun capaian kinerja secara angka mencapai 107,14% dari target yang ditetapkan, terdapat sejumlah kendala operasional yang menghambat kualitas dan efektivitas pelayanan. Permasalahan tersebut mulai dari terhambatnya lapangan akibat banjir di Aceh, perlunya perbaikan validasi aplikasi Fasih, hingga penyesuaian kuesioner dan evaluasi efisiensi anggaran TA 2025. Selain itu, diperlukan optimasi *response rate* serta konfirmasi data estimasi

tahun 2025 untuk komoditas strategis dan perusahaan perkebunan guna memastikan akurasi data sebelum dilakukan penyesuaian tata letak laporan dan kuesioner Sedapp 2026.

Kendala juga muncul dalam pembinaan statistik sektoral kepada Kementerian/Lembaga Mitra STPHP, yang disebabkan oleh pemahaman terhadap materi pembinaan belum dapat dipahami secara optimal karena materi disampaikan secara online.

Untuk itu, dengan capaian ini, Direktorat STPHP semakin memperkuat perannya dalam mendukung kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan relevan untuk pembangunan sektor pertanian dan hortikultura di Indonesia.

Sebagai bentuk rekomendasi dari analisis capaian kinerja pada Tahun 2025, maka dalam rangka pencapaian target IKU Direktorat STPHP yang disajikan dalam Renstra 2025-2029, disusun rekomendasi perbaikan kinerja atau tindak lanjut pada Tahun 2026 pada setiap periode triwulan antara lain:

1. Untuk Indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas, tindak lanjut yang akan dilakukan per triwulan pada tahun 2026 sebagai berikut :

Periode	Tindak Lanjut IKU I Direktorat STPHP Tahun 2026 menurut Tim		
(1)	(2)	(3)	(4)
Triwulan I	<p>1. Tim Statistik Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan I 2026</li> </ul>	<p>2. Tim Statistik Hortikultura</p> <p>Setelah koordinasi dengan tim terkait terlaksana, maka rencana berikutnya melakukan pembahasan persiapan instrumen, timeline kegiatan, dan sosialisasi ke daerah terkait persiapan Indeks Produksi bersama tim SIS, PMSS, dan Roren</p>	<p>3. Tim Statistik Tanaman Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei Komstrat Perkebunan: Solusi sudah ditindaklanjuti pada triwulan berjalan</li> <li>▪ Survei Perusahaan Perkebunan: Melakukan sosialisasi kuesioner sedapp online 2026 dengan Ditjenbun; Melakukan refreshing/pelatihan Survei Perusahaan Perkebunan ke BPS Provinsi dan Perusahaan</li> </ul>
Triwulan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan I 2026</li> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> </ul>	<p>Evaluasi pelaksanaan Survei Produksi Hortikultura triwulan I 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan I 2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei Komstrat: Evaluasi pelaksanaan Survei Komoditas Strategis triwulan I 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan I 2026</li> <li>▪ Survei Perusahaan Perkebunan: Evaluasi pelaksanaan Survei Perusahaan Perkebunan pada triwulan I 2026 untuk data bulanan dan tahunan</li> </ul>



Periode	Tindak Lanjut IKU I Direktorat STPHP Tahun 2026 menurut Tim		
(1)	(2)	(3)	(4)
Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan II 2026</li> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> </ul>	Evaluasi pelaksanaan Survei Produksi Hortikultura triwulan II 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan II 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei Komstrat: Evaluasi pelaksanaan Survei Komoditas Strategis triwulan II 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan II 2026</li> <li>▪ Survei Perusahaan Perkebunan: Evaluasi pelaksanaan Survei Perusahaan Perkebunan pada triwulan II 2026 untuk data bulanan dan tahunan</li> </ul>
Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan III 2026</li> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> </ul>	Evaluasi pelaksanaan Survei Produksi Hortikultura triwulan III 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan III 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Survei Komstrat: Evaluasi pelaksanaan Survei Komoditas Strategis triwulan III 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan III 2026</li> <li>▪ Survei Perusahaan Perkebunan: Evaluasi pelaksanaan Survei Perusahaan Perkebunan pada triwulan III 2026 untuk data bulanan dan tahunan</li> </ul>

2. Untuk Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektorale Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, tindak lanjut yang akan dilakukan per triwulan pada tahun 2026 sebagai berikut :

Periode	Tindak Lanjut IKU II Direktorat STPHP Tahun 2026
(1)	(2)
Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi hasil pembinaan triwulan IV 2025 untuk lokus pembinaan tahun 2025 (Kementan dan Kemen-ATR/BPN).</li> <li>● Menyusun timeline pembinaan statistik sektoral tahun 2026 untuk lokus Kementan, Kemen-ATR/BPN, dan KPPU.</li> <li>● Melakukan pembinaan statistik sektoral series 1.</li> </ul>
Triwulan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pembinaan statistik sektoral series 1.</li> <li>● Melakukan pembinaan statistik sektoral series 2 sampai 4.</li> </ul>
Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral sampai dengan triwulan II 2026.</li> <li>● Melakukan pembinaan statistik sektoral series 5 sampai 6.</li> <li>● Monev semester I 2026.</li> </ul>
Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral sampai dengan triwulan III 2026.</li> <li>● Melakukan pembinaan statistik sektoral series 7.</li> <li>● Monev semester II 2026.</li> </ul>

### 3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

#### 3.3.1 Capaian Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Prioritas Nasional (Pembinaan Statistik Sektoral)

Salah satu prioritas nasional yang pelaksanaannya melibatkan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Pembinaan Statistik Sektoral. Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai Pembina tujuh Kementerian/Lembaga mitra binaan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Output yang dihasilkan dari kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral

Selama tahun 2025 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah melakukan pembinaan pada 7 kementerian/lembaga yang menjadi mitra binaan. Tahapan pembinaan meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Output yang sudah dicapai selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 8 Output yang sudah dicapai selama tahun 2025**

Tahapan Persiapan	Tahapan Pelaksanaan	Tahapan Pelaporan	Tahapan Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama-nama Tim Pembinaan Statistik Sektoral sudah terinput pada Aplikasi Pembinaan;</li> <li>▪ Pelaksanaan internalisasi materi Pembinaan Statistik Sektoral</li> <li>▪ Pelaksanaan rapat koordinasi internal sebagai persiapan Pembinaan Statistik Sektoral Triwulan IV Tahun 2025 serta <i>refreshing pengajuan Rekomendasi Statistik dan pelaporan Metadata Statistik pada tanggal 15 September 2025</i>;</li> <li>▪ Pemutakhiran SK Tim PSS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi narahubung K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</li> <li>▪ Membuat Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menginput berkas pembinaan pada Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan Monitoring Evaluasi Mandiri</li> </ul>



Tahapan Persiapan	Tahapan Pelaksanaan	Tahapan Pelaporan	Tahapan Monitoring dan Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukasi seputar pembinaan statistik sektoral (esensial) IV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral yang ada di K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;</li> <li>Mengidentifikasi 2 kegiatan prioritas pembinaan pada K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;</li> <li>Melakukan pembinaan statistik sektoral sebanyak 24 kali, masing-masing 4 kali pada setiap K/L Mitra Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;</li> </ul>		

### Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut pembinaan statistik sektoral

Pelaksanaan pembinaan sektoral di Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tidak luput dari kendala. Setiap kendala yang ditemui sudah dicarikan solusi dan rencana tindak lanjut yang tepat sehingga tidak terjadi kendala serupa pada pelaksanaan pembinaan statistik sektoral kedepannya. Rangkuman kendala yang ditemui dan solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 9 Kendala dan Solusi Pembinaan Sektoral**

No	Kendala	Solusi
1	Di antara K/L yang dibina, masih ada yang hanya mengajukan 2 kegiatan lama untuk dilakukan pembinaan Statistik Sektoral, padahal kegiatan tersebut telah dilakukan penilaian selama 2 tahun berturut-turut.	K/L diminta untuk berkoordinasi dengan produsen data yang ada di K/L masing-masing agar dapat menambahkan kegiatan lain untuk dilakukan pembinaan.
2	Keterlambatan dalam melakukan input kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan di aplikasi PSS.	Menyiapkan template lengkap untuk input laporan kegiatan agar lebih cepat diunggah ke aplikasi PSS.
3	Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) cukup padat, sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi lebih lanjut.	Terdapat PIC untuk masing-masing K/L untuk mengatur atau memonitoring kegiatan pembinaan statistik sektoral (menambah personil)
4	Pemahaman terhadap materi pembinaan belum dapat dipahami secara optimal karena materi disampaikan secara online	Melakukan penguatan materi yang disampaikan pada triwulan III untuk beberapa K/L yang menjadi tanggung jawab Direktorat STPHP secara offline (BPK, Bapanas, Kemen

No	Kendala	Solusi
		ATR/BPN) dan sebagai tindak lanjut dari kendala triwulan III dan dilakukan pada triwulan IV 1. BPK Tanggal 3 November 2. Bapanas Tanggal 2 Desember 3. Kementerian ATR BPN Tanggal 20-21 November 2025

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim pembina Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah:

- Evaluasi hasil pembinaan triwulan IV 2025 untuk lokus pembinaan tahun 2025 (Kementan dan Kemen-ATR/BPN).
- Menyusun timeline pembinaan statistik sektoral tahun 2026 untuk lokus Kementan, Kemen-ATR/BPN, dan KPPU.
- Melakukan pembinaan statistik sektoral series 1.

### 3.3.2 Capaian Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Prioritas Presiden (Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah)

#### Variabel Utama

- Data luas panen dan produksi padi sesuai Kerangka Sampel Area (KSA) dan Survei Ubinan Padi yang diserahkan kepada Perum BULOG (dan stakeholder lainnya) setiap bulan.
- Bukti penyerahan output yang dihasilkan terdapat pada: [bulog](#)

**Diseminasi:** Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Luas Panen dan Produksi Padi tiap awal bulan

#### Aktivitas yang dilakukan :

- a. Menyediakan data luas panen dan produksi padi
- b. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait dengan pengelolaan gabah dan beras dalam negeri sebagai berikut:
  - Kementerian Pertanian (Kementan) untuk perencanaan target produksi, luas tanam, dan penyaluran bantuan/subsidi
  - Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta penyusunan prognosa pangan
  - Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan perumusan stabilisasi harga pangan dalam pengendalian inflasi
  - Kemenko Pangan untuk penyusunan neraca pangan dan neraca komoditas serta mengkoordinasikan implementasi HPP, impor/ekspor, dan program stabilisasi pasokan.
  - Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan K/L lainnya untuk perencanaan pembangunan sektor pangan.



Untuk mendukung kelancaran kegiatan, BPS juga menyusun rancangan metodologi KSA dan Ubinan, menyiapkan instrumen pengumpulan data data moda CAPI, ubinan menggunakan FASIH, serta menyiapkan instrumen diseminasi untuk publikasi hasil statistik. Hingga akhir 2025, telah tersedia rancangan metodologi KSA dan Ubinan yang baku, instrumen pengumpulan data, serta publikasi hasil kegiatan statistik melalui website BPS. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut memastikan tersedianya data padi yang akurat sebagai dasar kebijakan pengelolaan beras nasional.

Dalam prosesnya, kegiatan ini menghadapi beberapa kendala dan atas kendala tersebut dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

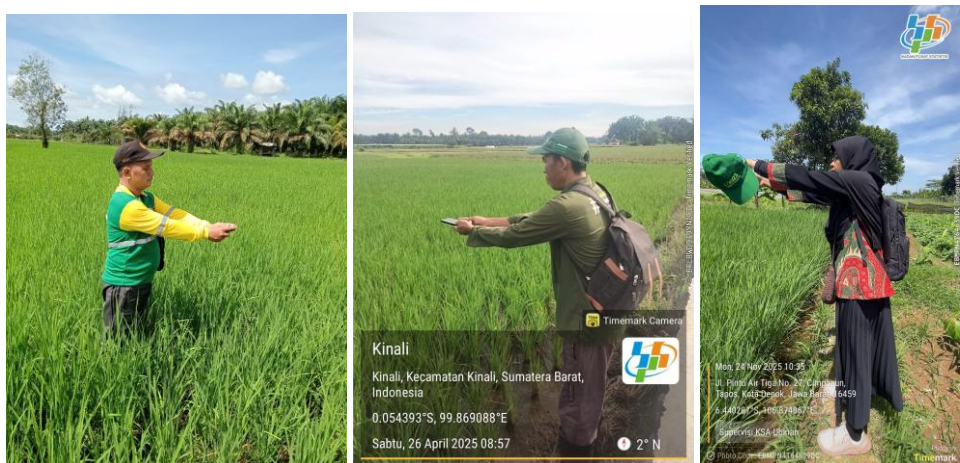
No	Kendala	Solusi
Survei KSA Padi		
1	Bencana alam di beberapa daerah di Indonesia yang menghambat pelaksanaan KSA baik dari segi waktu maupun keterjangkauan lokasi sampel segmen	Penyesuaian jadwal survei pada daerah yang terkena bencana
2	Kapasitas <i>server/clouds/storage</i> yang terbatas dan file foto amatan lapangan KSA yang semakin bertambah (membutuhkan ruang/ <i>space</i> yang lebih) sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesalahan/ <i>error</i> pada saat pengiriman data amatan oleh petugas KSA	Penambahan kapasitas <i>server/clouds/storage</i>
Survei Ubinan Padi		
1	Adanya kejadian lewat panen yang disebabkan karena petugas tidak diinfokan mengenai jadwal panen dari petani yang terkadang dilakukan secara mendadak dan pelaksanaan panen yang dilakukan serentak menggunakan <i>combined harvester</i> sehingga petugas tidak sempat melakukan ubinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan hubungan dan komunikasi antara petugas dan petani/keompok tani</li> <li>- di beberapa daerah juga sudah ada yang membuat aplikasi reminder ubinan</li> </ul>

Selanjutnya terdapat rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu pembaruan kuesioner ubinan. Berikut dokumentasi kegiatan :

## Survei Ubinan Padi



## Survei KSA Padi





### 3.3.3 Capaian Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada Isu Strategis Nasional (Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas)

Output yang dihasilkan mencakup data komoditas pangan utama seperti gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih. Data ini merupakan bahan penting dalam proses perumusan kebijakan, terutama dalam penyusunan neraca komoditas dan percepatan pembangunan sektor pergaraman nasional. Dokumentasi pendukung yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi Perpres Nomor 17 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2025. Dalam hal terkait dengan komoditas cakupan yang terdapat pada Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah komoditas beras, jagung, dan bawang putih.

**Untuk data komoditas padi dan jagung,** dievaluasi kendala dan solusi sebagai berikut:

No	Kendala	Solusi
Survei KSA Padi dan KSA Jagung		
1	Bencana alam di beberapa daerah di Indonesia yang menghambat pelaksanaan KSA baik dari segi waktu maupun keterjangkauan lokasi sampel segmen	Penyesuaian jadwal survei pada daerah yang terkena bencana
2	Kapasitas <i>server/clouds/storage</i> yang terbatas dan file foto amatan lapangan KSA yang semakin bertambah (membutuhkan ruang/ <i>space</i> yang lebih) sehingga mengakibatkan sering terjadinya kesalahan/ <i>error</i> pada saat pengiriman data amatan oleh petugas KSA	Penambahan kapasitas <i>server/clouds/storage</i>

Pengembangan yang telah dilakukan:

- Penggunaan web based monitoring untuk mengoptimalkan pemeriksaan secara aktual setiap bulan.
- Migrasi sistem pendataan dan pengolahan CAPI dari BPPT ke BPS.
- Pada ksa padi, Pemanfaatan citra satelite dan pemodelan machine learning untuk memprediksi fase tumbuh padi di suatu titik (*mixed method*), jika akurasiya baik, berpotensi digunakan melengkapi informasi KSA khususnya di area remote.

Rencana tindak lanjut:

- Penggunaan remote sensing dan machine learning dalam membangun polygon populasi lahan potensi jagung sebagai dasar KSA Jagung yang lebih akurat.
- Penggunaan drone.
- Pengembangan KSA untuk komoditas lain.

**Untuk komoditas Bawang Putih**, diidentifikasi kendala dan solusi sebagai berikut :

No	Kendala	Solusi
1	Organisasi: Keterlambatan pengiriman dokumen SPH dan belum adanya unit khusus pengelolaan data di Dinas Pertanian, sehingga masih membutuhkan dukungan dari BPS.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta berkoordinasi secara berjenjang baik di level pusat, maupun daerah.
2	SDM: Beban kerja tinggi dengan cakupan luas, jumlah petugas terbatas, sering terjadi pergantian petugas, serta kualitas petugas yang bervariasi.	Peningkatan teknologi Informasi : Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengolahan dan Pengiriman Data SPH mencakup beberapa perubahan signifikan dari sistem lama ke sistem yang lebih efisien.
3	Metodologi: Data berasal dari kompilasi administrasi, sehingga masih memiliki kelemahan dalam ketepatan hasil.	Merancang kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sampel panel dan dilakukan secara triwulanan berbasis metode estimasi untuk mengukur perkembangan produksi Survei Indeks Produksi Hortikultura : subsektor hortikultura di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mengontrol kualitas data SPH yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian serta mendukung penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.
4	Geografis: Pengiriman laporan fisik tidak efektif, wilayah survei luas terutama di daerah terpencil Biaya: Anggaran pusat menurun, distribusi form SPH ke daerah sulit, serta anggaran pelatihan SDM terbatas.	Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengolahan dan Pengiriman Data SPH mencakup beberapa perubahan signifikan dari sistem lama ke sistem yang lebih efisien, yaitu dengan teknologi informasi berbasis <i>paperless</i> dan <i>web-based</i> .



No	Kendala	Solusi
5	Validitas: Sering terjadi kesalahan input; <i>contact person</i> sulit dihubungi/proses konfirmasi kesalahan dokumen membutuhkan waktu yang lama; validasi manual cukup menyulitkan petugas.	Melakukan monitoring, pemeriksaan, evaluasi, dan konfirmasi ulang data statistik hortikultura secara periodik.
6	Pelaporan data tepat waktu	Melakukan perubahan moda dengan SPH-CAWI (Computer Aided Web Interviewing) : SPH CAWI merupakan MODUL dalam aplikasi SIPEDAS berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH.
7	Peningkatan kualitas data yang dilaporkan	Akan dimonitoring dan dievaluasi menggunakan data pembandingan berupa Indeks Produksi.

Sesuai Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres 61/2024 mengenai Neraca Komoditas, dalam perhitungan produksi Neraca Komoditas, data *supply* bawang putih terdiri dari data stok akhir tahun 2025 dan perkiraan produksi tahun 2026. Kedua data tersebut berasal dari penghitungan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, dimana data BPS yang telah satu data dengan Kementerian Pertanian berasal dari kegiatan SPH yang digunakan untuk proyeksi produksi bawang putih. Sejalan dengan pentingnya data hasil Pendataan SPH, terdapat beberapa rencana tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan di 2026, yaitu.

1. Melakukan sosialisasi dan implementasi ke BPS daerah mengenai dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS antara Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dan Sekretariat Utama BPS Nomor B-263/HK-220/D/05/2025 Nomor 16.2/HK.610/PKS/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Satu Data Statistik Pertanian Hortikultura) yang meliputi penyusunan pedoman, bahan materi dan pelatihan petugas, pengolahan dan pengiriman data, monitoring dan evaluasi, penjaminan kualitas, pengembangan sistem pengumpulan, pengolahan, pengiriman, monitoring dan evaluasi data, yang sudah memenuhi pertukaran data/interoperabilitas melalui sistem sehingga Tercapai Satu Datu Hortikultura (antara SPH Online BPS dan SPH *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI)/Sistem Penyediaan Data Statistik Pertanian Hortikultura (SIPEDAS Hortikultura, Kementan), dan Diseminasi Data SPH
2. Melakukan pertemuan secara berkala dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Penanggung Jawab Statistik Hortikultura di BPS Provinsi untuk evaluasi data SPH dan kegiatan lain dalam

pengumpulan data statistik hortikultura. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan dan evaluasi data secara bulanan yang sudah dilakukan.

3. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Hortikultura Kementan RI mengenai pendataan bawang putih agar data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaporan melalui aplikasi Sipedas.

### 3.4 Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025

Untuk mewujudkan penyediaan data statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis spasial. Berikut adalah beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP). Inovasi yang dimaksud adalah inovasi baik berupa aplikasi maupun inovasi lainnya yang diterapkan pada tahun 2025 maupun sebelumnya baik diterapkan sebagian maupun seluruhnya di satuan kerja.

#### 1. KSA Padi

KSA Padi dapat mengatasi persoalan subjektivitas penghitungan luas panen dan produksi padi/beras nasional yang sebelumnya dilakukan dengan *eye estimate*. Secara rinci, sejumlah manfaat/dampak positif dari inovasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya data produksi padi/beras yang lebih cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan terkait komoditas ini, khususnya kebijakan impor dan serapan produksi padi/beras yang dihasilkan petani. Pemanfaatan perangkat Android mempercepat proses pengolahan data, dan metode statistik meningkatkan akurasi data.
- b. Tersedianya data potensi produksi padi untuk tiga bulan ke depan secara berkala sehingga dapat digunakan sebagai *early warning system* bagi para pemangku kepentingan terkait kebijakan impor, penyerapan gabah petani, penyediaan anggaran, dan distribusi beras.
- c. Tersedianya informasi spasial komoditas padi/beras yang terkini sebagai input pengambilan kebijakan pemerintah.
- d. Memperkuat sistem statistik nasional dengan terbangunnya kerjasama dan koordinasi yang padu antara lembaga pemerintah dalam penyediaan data padi.

Untuk KSA Padi ini terdapat informasi tambahan:

- KSA Padi Inovasi pada Tahun 2018, yang dimulai tahun 2018, dan pernah diajukan inovasi dengan nama kegiatan RADAR PADI di 2019
- Replikasi untuk KSA Jagung yang pertama kali rilis di Tahun 2023, namun kajian/pengembangannya sudah dimulai sejak 2019/2020



- Inovasi mulai diterapkan sejak Tahun 2019 dan diperbaharui setiap tahun sesuai masukan dari entitas (Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta(PBS)), tahun 2026 sudah bersifat publik untuk PBN dan PBS
  - Tautan dokumen digital bukti implementasi inovasi [http://s.bps.go.id/Inovasi\\_KSAPadi](http://s.bps.go.id/Inovasi_KSAPadi)
  - Penerima manfaat dari inovasi tersebut: Internal unit kerja/satker, BPS secara keseluruhan, K/L/Pemda, Masyarakat umum
2. Sedia Data Perusahaan Perkebunan melalui Aplikasi SKB Online (SEDAPP *Online*)
- Inovasi ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan satu data Indonesia (SDI) khusus Perkebunan dengan SOP yang lebih efektif dan efisien, tetapi menghasilkan data yang akurat dan terkini. Inovasi ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan pengolahan dan diseminasi data komoditas strategis perkebunan dengan peran aktif pelaku usaha dan BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota untuk mengisi secara mandiri data terkini yang dimiliki pada SEDAPP Online yang berbasis *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) sehingga memperoleh data yang akurat dan disajikan tepat waktu untuk perencanaan pembangunan subsektor perkebunan. Sampai saat ini tercatat sekitar 300 perusahaan (sekitar 15 persen dari total perusahaan) sudah mengisi secara CAWI.
- Inovasi ini telah di replika untuk data Perkebunan Rakyat (PR) dengan adanya E-statistikbun oleh Ditjenbun Kementerian Pertanian
  - Inovasi mulai diterapkan sejak Tahun 2019 dan diperbaharui setiap tahun sesuai masukan dari entitas (Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta(PBS)), tahun 2026 sudah bersifat publik untuk PBN dan PBS
  - Tautan dokumen digital bukti implementasi inovasi <https://drive.bps.go.id/s/PsZNpRiBC9LqygY>
  - Penerima manfaat dari inovasi tersebut: Internal unit kerja/satker, BPS secara keseluruhan, K/L/Pemda, Pelaku Usaha (PBN dan PBS), Asosiasi, Dewan komoditas

Di samping itu, selama tahun 2025, Direktorat STPHP memperoleh beberapa penghargaan, baik dari internal maupun eksternal, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan sebagai Terbaik III dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat.



Gambar 3.3 Penghargaan Terbaik III dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat

2. Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas.



Gambar 3.4 Penghargaan Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas

3. Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 sebesar 92,419 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan).



Gambar 3.5 Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025

4. Penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, atas dukungan dalam penyediaan data komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama tahun 2025.



Gambar 3.6 Penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI

5. Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional atas kontribusi dalam penyediaan data komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bulanan untuk proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025.



Gambar 3. 7 Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional

6. Penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan gula di Indonesia selama tahun 2025.



Gambar 3. 8 Penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia

7. Penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia (ATI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan teh di Indonesia selama tahun 2025.



Gambar 3. 9 Penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia

### 3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

#### 3.5.1 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan telah didasarkan pada Reviu Rencana Strategis tahun 2025–2029 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. 10 Komposisi Realisasi Anggaran Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Anggaran			
	Pagu Anggaran (Rp)	Persen Anggaran (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1. Menyediakan data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	1.000.217.000	96,04	951.628.564	95,14
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketersediaan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas				

Tujuan/Sasaran Strategis	Anggaran			
	Pagu Anggaran (Rp)	Persen Anggaran (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 2. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam penyelenggaraan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melalui Sistem Statistik Nasional	41.186.000	3,95	26.825.590	65,13
Sasaran Strategis 2 : Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I				
Total	1.041.403.000	100	978.454.154	93,96

Tabel di atas memberikan informasi Nilai DIPA Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp1.041.403.000,- pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Selama tahun anggaran 2025, Direktorat STPHP melakukan serapan anggaran sebesar 93,96 persen atau senilai Rp978.454.154,-.

Pada tabel di atas juga terlihat alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja sasaran. Alokasi anggaran sebagian besar digunakan pada sasaran “Meningkatnya ketersediaan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas”, yaitu mencapai 96,04 persen meliputi kegiatan penyediaan data dan publikasi statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Realisasi anggaran pada indikator ini mencapai 95,14 persen. Sementara pada indikator kinerja sasaran “Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I” hanya sebesar 3,95 persen yang meliputi kegiatan aktivitas pembinaan dan K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan sektoral dengan realisasi anggaran sebesar 65,13 persen.

Data anggaran dan realisasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menggambarkan tujuan dapat dilaksanakan dengan pengelolaan anggaran yang memadai. Meskipun secara umum anggaran dan realisasi menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu, transparansi dalam pelaporan dan komunikasi merupakan faktor utama dalam memastikan keberhasilan untuk mencapai tujuan.

### 3.5.2 Analisis dan Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi anggaran dilakukan oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan adalah optimalisasi biaya kegiatan dengan pertemuan/koordinasi/perjalanan dinas dengan cara:

1. Pelatihan atau *Briefing* petugas dilakukan secara daring, baik melalui Zoom atau Bangkom (seperti *Briefing* KSA, *Briefing* VP-Horti dan VN-Horti, Rapat Teknis Evaluasi Angka Produktivitas Padi dan Palawija SR 3 2024, Refreshing Input Data Sedapp Online, Rakor Persiapan Rilis Luas Panen dan Produksi Padi dan Jagung di Indonesia 2024 (Angka Tetap).



2. Diseminasi dilakukan di web bukan media cetak sehingga menghemat anggaran pencetakan publikasi (seperti Publikasi *Updating* DPP dan DUTL 2024).
3. Media komunikasi lanjutan dari pembinaan sektoral yang digunakan tidak harus selalu pertemuan formal yang mengakibatkan pembebanan biaya anggaran baik di BPS maupun di K/L/D/I, tetapi diskusi secara intensif dilaksanakan melalui WA *Group* K/L mitra PSS.
4. Perjalanan dinas dilakukan secara lebih efisien dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang terbatas, misalnya perjalanan yang sebelumnya menggunakan moda transportasi udara dialihkan ke moda transportasi darat seperti kereta api yang lebih ekonomis. Selain itu, pengaturan jadwal perjalanan dilakukan secara kolektif untuk beberapa kegiatan sekaligus guna menghindari perjalanan berulang ke lokasi yang sama.

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Rumus yang digunakan dalam perhitungan efisiensi anggaran yaitu sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\% \text{capaian kinerja}}{\% \text{realisasi anggaran}}$$

Jika  $\geq 1$  artinya efisien  
Jika  $< 1$  artinya tidak efisien

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2025 adalah sebesar 1,14 yang berasal dari besaran realisasi anggaran 93,96 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 107,14 persen. Hal ini berarti penggunaan anggaran di Direktorat STPHP sudah efisien karena angka efisiensinya sudah di atas 1. Besaran efisiensi anggaran berdasarkan Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.11 Capaian Kinerja Utama Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan <i>Insight</i> yang relevan									
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya penyediaan data dan <i>Insight</i> statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkualitas	Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen	100	100	100,00	1.000.217.000	951.628.564	95,14	1,05

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 2. Mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien									
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas	Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75	85,71	114,28	41.186.000	26.825.590	65,13	1,75
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Utama</b>		<b>107,14</b>				<b>1.041.403.000</b>	<b>978.454.154</b>	<b>93,96</b>	<b>1,14</b>

Apabila dilihat berdasarkan indikator sasaran, angka efisiensi anggaran yang dilakukan pada indikator sasaran “Terwujudnya penyediaan data dan *Insight* statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas” pada tahun 2025 adalah sebesar 1,05 yang berasal dari besaran realisasi anggaran sebesar 95,14 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 100 persen. Sedangkan, untuk indikator sasaran “Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas” berhasil meraih angka efisiensi anggaran sebesar 1,75 yang berasal dari besaran realisasi anggaran sebesar 65,13 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 114,28 persen. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka disimpulkan penggunaan anggaran di setiap indikator sasaran di Direktorat STPHP sudah efisien karena semua angka efisiensi sudah bernilai diatas 1.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Direktorat STPHP tahun 2025 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran indikator utama sebesar 107,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat STPHP dapat memenuhi seluruh target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Direktorat STPHP menyadari akan berbagai keterbatasan, sehingga diperlukan penyempurnaan di beberapa kegiatan. Upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Direktorat STPHP agar kualitas indikator kinerja sasaran dapat meningkat untuk tahun selanjutnya.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Direktorat STPHP selama tahun 2025 antara lain:

1. Rata-rata capaian kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2023 dan 2024 mencapai sekitar 100,00 persen. kemudian meningkat menjadi 107,14 pada tahun 2025. Artinya, seluruh indikator dalam capaian kinerja utama (IKU) tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan berhasil memperoleh nilai Predikat Kinerja Organisasi (PKO) sebesar 94,5% yang dikategorikan dalam predikat "Baik" sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024. Pencapaian ini merefleksikan efektivitas unit kerja dalam merealisasikan target-target strategis serta menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun. Predikat "Baik" ini sekaligus mengindikasikan bahwa organisasi telah berhasil merealisasikan hampir seluruh indikator kinerja utama yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan dengan sangat efektif.
3. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada tahun 2025 Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mengalami beberapa kali kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga pada kondisi 31 Desember 2025 tercatat alokasi anggaran sebesar yaitu sebesar Rp1.041.403.000,- pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Selama tahun anggaran 2025, Direktorat STPHP melakukan serapan anggaran sebesar 93,96 persen atau senilai Rp978.454.154,-.
4. Efisiensi anggaran yang dilakukan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2025 adalah sebesar 1,14 yang berasal dari besaran realisasi anggaran 93,96 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 107,14 persen. Hal ini berarti penggunaan anggaran di Direktorat STPHP sudah efisien karena angka efisiensinya sudah di atas 1.

## 4.2 Rekomendasi perbaikan kinerja

Sebagai bentuk rekomendasi dari analisis capaian kinerja pada Tahun 2025, maka dalam rangka pencapaian target IKU Direktorat STPHP yang disajikan dalam Renstra 2025–2029, disusun rekomendasi perbaikan kinerja atau tindak lanjut pada Tahun 2026 pada setiap periode triwulan antara lain:

1. Untuk Indikator Kinerja Persentase Publikasi/Laporan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas, tindak lanjut yang akan dilakukan per triwulan pada tahun 2026 sebagai berikut :

Periode	Tindak Lanjut IKU I Direktorat STPHP Tahun 2026 menurut Tim		
(1)	(2)	(3)	(4)
Triwulan I	<p>1. Tim Statistik Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan I 2026</li> </ul>	<p>2. Tim Statistik Hortikultura</p> <p>Setelah koordinasi dengan tim terkait terlaksana, maka rencana berikutnya melakukan pembahasan persiapan instrumen, timeline kegiatan, dan sosialisasi ke daerah terkait persiapan Indeks Produksi bersama tim SIS, PMSS, dan Roren</p>	<p>3. Tim Statistik Tanaman Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Survei Komstrat Perkebunan: Solusi sudah ditindaklanjuti pada triwulan berjalan</li> <li>● Survei Perusahaan Perkebunan: Melakukan sosialisasi kuesioner sedapp online 2026 dengan Ditjenbun; Melakukan refreshing/pelatihan Survei Perusahaan Perkebunan ke BPS Provinsi dan Perusahaan</li> </ul>
Triwulan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan I 2026</li> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> </ul>	<p>Evaluasi pelaksanaan Survei Produksi Hortikultura triwulan I 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan I 2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Survei Komstrat: Evaluasi pelaksanaan Survei Komoditas Strategis triwulan I 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan I 2026</li> <li>● Survei Perusahaan Perkebunan: Evaluasi pelaksanaan Survei Perusahaan Perkebunan pada triwulan I 2026 untuk data bulanan dan tahunan</li> </ul>
Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan II 2026</li> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> </ul>	<p>Evaluasi pelaksanaan Survei Produksi Hortikultura triwulan II 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan II 2026</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Survei Komstrat: Evaluasi pelaksanaan Survei Komoditas Strategis triwulan II 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan II 2026</li> <li>● Survei Perusahaan Perkebunan: Evaluasi pelaksanaan Survei</li> </ul>

Periode	Tindak Lanjut IKU I Direktorat STPHP Tahun 2026 menurut Tim		
(1)	(2)	(3)	(4)
			Perusahaan Perkebunan pada triwulan II 2026 untuk data bulanan dan tahunan
Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengevaluasi LK hasil amatan saat kahar pada triwulan III 2026</li> <li>▪ Saat keadaan kahar, disiapkan LK untuk melaporkan hasil amatan</li> </ul>	Evaluasi pelaksanaan Survei Produksi Hortikultura triwulan III 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan III 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Komstrat: Evaluasi pelaksanaan Survei Komoditas Strategis triwulan III 2026 serta indeks produksi yang dihasilkan pada triwulan III 2026</li> <li>• Survei Perusahaan Perkebunan: Evaluasi pelaksanaan Survei Perusahaan Perkebunan pada triwulan III 2026 untuk data bulanan dan tahunan</li> </ul>

2. Untuk Indikator Kinerja Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, tindak lanjut yang akan dilakukan per triwulan pada tahun 2026 sebagai berikut :

Periode	Tindak Lanjut IKU II Direktorat STPHP Tahun 2026
(1)	(2)
Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi hasil pembinaan triwulan IV 2025 untuk lokus pembinaan tahun 2025 (Kementan dan Kemen-ATR/BPN).</li> <li>• Menyusun timeline pembinaan statistik sektoral tahun 2026 untuk lokus Kementan, Kemen-ATR/BPN, dan KPPU.</li> <li>• Melakukan pembinaan statistik sektoral series 1.</li> </ul>
Triwulan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pembinaan statistik sektoral series 1.</li> <li>• Melakukan pembinaan statistik sektoral series 2 sampai 4.</li> </ul>
Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral sampai dengan triwulan II 2026.</li> <li>• Melakukan pembinaan statistik sektoral series 5 sampai 6.</li> <li>• Monev semester I 2026.</li> </ul>
Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral sampai dengan triwulan III 2026.</li> <li>• Melakukan pembinaan statistik sektoral series 7.</li> <li>• Monev semester II 2026.</li> </ul>

## LAMPIRAN





Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan 1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan</b>			
<b>Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas</b>	Persentase publikasi/laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas	Persen	100
<b>Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif dan Efisien</b>			
<b>Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75

Program/Kegiatan	Anggaran
1) 2910   Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp 5.804.569.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.804.569.000</b>

Lampiran 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025

No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		< D1	DIII	S1/DIV	S2	S3	
	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1	3	28	24	1	57
1.	Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1		1
2.	Statistisi Ahli Madya			1	7		8
3.	Statistisi Ahli Muda		1	6	15		22
4.	Statistisi Ahli Pertama			14			14
5.	Statistisi Penyelia			1			1
6.	Statistisi Terampil		1				1
7.	Arsiparis Ahli Pertama			1			1
8.	Fungsional Umum			1			1
9.	Staf	1	1	4	1	1	8

Lampiran 3 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025

No	Unit Organisasi	Golongan Kepangkatan										Jumlah
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IVd	
	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1	1	6	10	10	15	7	5	1	1	57
1.	Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										1	1
2.	Statistisi Ahli Madya							2	5	1		8
3.	Statistisi Ahli Muda					7	13	2				22
4.	Statistisi Ahli Pertama			4	9	1						14
5.	Statistisi Penyelia						1					1
6.	Statistisi Terampil	1										1
7.	Arsiparis Ahli Pertama			1								1
8.	Fungsional Umum						1					1
9.	Staf		1	1	1	2		3				8

**Lampiran 4 Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025**

No	Unit Organisasi	Jumlah
	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	47
1.	Statistisi Ahli Madya	8
2.	Statistisi Ahli Muda	22
3.	Statistisi Ahli Pertama	14
4.	Statistisi Penyelia	1
5.	Statistisi Terampil	1
6.	Arsiparis Ahli Pertama	1

**Lampiran 5 Daftar K/L Target Pembinaan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>K/L Pembinaan Tahun 2025</b>
1.	Kementerian Pertanian (Kementan)
2.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3.	Badan Pangan Nasional (Bapanas)
4.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN)
5.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
6.	Badan Keamanan Laut (Bakamla)
7.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

**Lampiran 6 Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025**

No	Nama Prestasi/Penghargaan	Jenis Prestasi/Penghargaan	Instansi Pemberi
1	Penghargaan sebagai Terbaik III dalam Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Kategori Unit Kerja Eselon II BPS Pusat	Internal	BPS
2	Penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat dengan Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 yang dinyatakan Berkualitas	Internal	BPS
3	Penghargaan Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025	Internal	BPS
4	Penghargaan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI, atas dukungan dalam penyediaan data komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan selama tahun 2025	Eksternal	Kementerian Pertanian
5	Penghargaan dari Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional atas kontribusi dalam penyediaan data komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bulanan untuk proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025	Eksternal	Badan Pangan Nasional
6	Penghargaan dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan gula di Indonesia selama tahun 2025	Eksternal	Asosiasi Gula Indonesia
7	Penghargaan dari Asosiasi Teh Indonesia (ATI) atas dukungan dalam penyediaan data terkait perkembangan teh di Indonesia selama tahun 2025	Eksternal	Asosiasi Teh Indonesia


**Lampiran 7 Daftar Inovasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025**

No	Inovasi
1	KSA Padi
2	Sedia Data Perusahaan Perkebunan melalui Aplikasi SKB Online (SEDAPP Online)

Lampiran 8 Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TA 2025

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Persen Anggaran (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
Tujuan 1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data statistik berkualitas dan <i>Insight</i> yang relevan									
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya penyediaan data dan <i>Insight</i> statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas	Persentase publikasi/laporan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Persen	100	100	100,00	1.000.217.000	96,04	951.628.564	95,14
Tujuan 2. Mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien									
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pembinaan statistik sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkualitas	Tingkat keberhasilan pembinaan statistik sektoral Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Poin	75	85,71	114,28	41.186.000	3,95	26.825.590	65,13
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Utama</b>		<b>107,14</b>							

## Anggaran pada Perjanjian Kinerja 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
DIREKTORAT STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Eko Marsoro, MM.  
Jabatan : Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : M. Habibullah, S.Si, M.Si  
Jabatan : Deputy Bidang Statistik Produksi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



M. Habibullah, S.Si, M.Si  
NIP. 19670619198901 1 001

Palembang, 24 Januari 2025  
Pihak Pertama




Ir. Eko Marsoro, MM.  
NIP. 19660625198802 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
DIREKTORAT STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyediaan Data dan <i>Insight</i> Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	Persentase Publikasi/Laporan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Berkualitas	100,00 Persen
2.	Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75,00 Poin


Program/Kegiatan	Anggaran
1) 2910   Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 5.804.569.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.804.569.000</b>

Deputi Bidang Statistik Produksi



M. Habibullah, S.Si, M.Si  
NIP. 19670619198901 1 001

Palembang, 24 Januari 2025  
Direktur Statistik Tanaman Pangan,  
Hortikultura, dan Perkebunan



Ir. Eko Marsoro, MM.  
NIP. 19660625198802 1 001

Anggaran pada Kondisi Laporan 31 Desember 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi

Periode Desember 2025

Kementerian : 054 BADAN PUSAT STATISTIK  
 Unit Organisasi : 01 BADAN PUSAT STATISTIK  
 Satuan Kerja : 018576 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>41,186,000</b>	<b>0</b>	<b>5,610,000</b>	<b>21,215,590</b>	<b>26,825,590</b>	<b>65.13 %</b>	<b>14,360,410</b>
GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	41,186,000	0	5,610,000	21,215,590	26,825,590	65.13 %	14,360,410
GG.2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	41,186,000	0	5,610,000	21,215,590	26,825,590	65.13 %	14,360,410
<b>BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>41,186,000</b>	<b>0</b>	<b>5,610,000</b>	<b>21,215,590</b>	<b>26,825,590</b>	<b>65.13 %</b>	<b>14,360,410</b>
<b>BDB.100 PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	<b>41,186,000</b>	<b>0</b>	<b>5,610,000</b>	<b>21,215,590</b>	<b>26,825,590</b>	<b>65.13 %</b>	<b>14,360,410</b>
<b>100 PELAKSANAAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>41,186,000</b>	<b>0</b>	<b>5,610,000</b>	<b>21,215,590</b>	<b>26,825,590</b>	<b>65.13 %</b>	<b>14,360,410</b>
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	41,186,000	0	5,610,000	21,215,590	26,825,590	65.13 %	14,360,410
522151 Belanja Jasa Profesi	14,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	64.29 %	5,000,000
000981. honor narasumber eselon II pembinaan statistik sektoral statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000982. honor narasumber eselon III pembinaan statistik sektoral statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	100.00	0
02-12-2025 03063T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					9,000,000		
Pembayaran Belanja Jasa Profesi tanggal 13-20 November 2025 a.n Arie Purwanto dkk (22 orang) sesuai SK no. 251110-03/SKKPA/2025 tanggal 10							
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,436,000	0	0	10,175,590	10,175,590	70.49 %	4,260,410
000983. perjalanan dinas pembinaan statistik sektoral statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	14,436,000	0	0	10,175,590	10,175,590	70.49 %	4,260,410
02-12-2025 03083T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					7,899,590		
Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa tgl 18-26 November 2025 an. Ir. Adhi Wiriana, dkk 10 orang sesuai dengan Surtug No: B-217/05200/KP.							
17-12-2025 03510T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					2,276,000		
Pbyrn belanja perjalanan dinas biasa an Ika Wirawati dkk (2 dkk) keg tgl 4 sd 11 Desember 2025 sesuai ST no. B-281/05100/KP. 650/2025 tgl 3 Desember							
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,750,000	0	5,610,000	2,040,000	7,650,000	60.00 %	5,100,000
000984. transport lokal pembinaan statistik sektoral statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	12,750,000	0	5,610,000	2,040,000	7,650,000	60.00 %	5,100,000
12-11-2025 02772T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					340,000		
Pembayaran Binja perjadiin Biasa tgl 4 s/d 7 Nop 2025 an. Eko Haryono, dkk 2 org Surtug No: B-200/05200/KP.650/2025 tgl 31 Okt 2025, Binja Perdin							
21-11-2025 02909T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					5,100,000		
Pmbryrn Binja Perjadiin Dalkot lbh dr 8 jam tgl 27-28 Okt 2025 an. Dyah R, dkk 2 org Surtug No: B-0905.5/32763/VS.100/2025 tgl 22 okt 2025, Binja Perjadiin							

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi

Periode Desember 2025

Kementerian : 054 **BADAN PUSAT STATISTIK**  
 Unit Organisasi : 01 **BADAN PUSAT STATISTIK**  
 Satuan Kerja : 018576 **SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK**

Hal 1 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>1,000,217,000</b>	<b>0</b>	<b>791,361,477</b>	<b>160,267,087</b>	<b>951,628,564</b>	<b>95.14 %</b>	<b>48,588,436</b>
GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1,000,217,000	0	791,361,477	160,267,087	951,628,564	95.14 %	48,588,436
GG.2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1,000,217,000	0	791,361,477	160,267,087	951,628,564	95.14 %	48,588,436
<b>BMA Data dan Informasi Publik</b>	<b>1,000,217,000</b>	<b>0</b>	<b>791,361,477</b>	<b>160,267,087</b>	<b>951,628,564</b>	<b>95.14 %</b>	<b>48,588,436</b>
<b>BMA.007 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN</b>	<b>775,008,000</b>	<b>0</b>	<b>619,671,075</b>	<b>144,083,487</b>	<b>763,754,562</b>	<b>98.55 %</b>	<b>11,253,438</b>
051 Persiapan	53,900,000	0	14,400,000	36,200,000	50,600,000	93.88 %	3,300,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	29,600,000	0	14,400,000	12,800,000	27,200,000	91.89 %	2,400,000
522151 Belanja Jasa Profesi	29,600,000	0	14,400,000	12,800,000	27,200,000	91.89 %	2,400,000
001026. honor narasumber pejabat eselon ii yang disetarakan survei pertanian tanaman pangan/ubinan	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
02-12-2025 03063T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					2,000,000		
Pembayaran Belanja Jasa Profesi tanggal 13-20 November 2025 a.n Arie Purwanto dkk (22 orang) sesuai SK no. 251110-03/SKKPA/2025 tanggal 10							
001027. honor narasumber pejabat eselon iii yang disetarakan survei pertanian tanaman pangan/ubinan	14,400,000	0	3,600,000	10,800,000	14,400,000	100.00	0
15-05-2025 00597T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					1,800,000		
Pembayaran Belanja Jasa Profesi periode kegiatan tanggal 23 April 2025 an. Dr. Resa Setia Adiandri,S.TP.M.Si sesuai dengan SK Nomor:250422-							
17-10-2025 02267T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					1,800,000		
Pembayaran belanja jasa profesi an Arif Muliawan keg tgl 30 Sept 2025 sesuai SKKPA BPS No 250929-01/SKKPA/2025 tgl 29 Sept 2025							
02-12-2025 03063T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					10,800,000		
Pembayaran Belanja Jasa Profesi tanggal 13-20 November 2025 a.n Arie Purwanto dkk (22 orang) sesuai SK no. 251110-03/SKKPA/2025 tanggal 10							
001029. honor narasumber pejabat eselon iii/ yang disetarakan ksa	12,600,000	0	10,800,000	0	10,800,000	85.71 %	1,800,000
30-04-2025 00492T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					5,400,000		
Pbym binj perdin dalkot an Eko H dkk (4 orang) keg tgl 5 Maret 2025 ST No B-25/05200/KP.650/2025 tgl 4 Maret 2025 dan Binja jasa profesi an. Heri S							
15-11-2025 01929T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK					5,400,000		
Pembayaran Belanja Jasa Profesi tgl 10 September 2025 an.Efi Respati,dkk 4 orang sesuai dengan SK No. 250819-05/SKKPA/2025 Tanggal 19 Agustus							
001881. efisiensi	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025**

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Transaksi  
Periode Desember 2025

Kementerian : 054 **BADAN PUSAT STATISTIK**  
Unit Organisasi : 01 **BADAN PUSAT STATISTIK**  
Satuan Kerja : 018576 **SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK**

Hal 6 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
11-12-2025 03190T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa an Ika Wirawati dkk (8 org) keg tgl 5 sd 28 November 2025 sesuai ST no. B-235/05100/KP.650/2025 tgl 3					28,258,301		
15-12-2025 03430T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran Belanja perjalanan dinas Biasa tanggal 1 s/d 5 Desember 2025 an. Simon Halomoan,dkk 6 orang sesuai Surat Tugas No: B-252/05200/KP.					36,720,814		
<b>001826. indept Study Survei Konversi Gabah Beras</b>	<b>141,433,000</b>	<b>0</b>	<b>128,739,722</b>	<b>11,674,680</b>	<b>140,414,402</b>	<b>99.28 %</b>	<b>1,018,598</b>
12-11-2025 02772T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran Binja perjadiin Biasa tgl 4 s/d 7 Nop 2025 an. Eko Haryono,dkk 2 org Surtug No: B-200/05200/KP.650/2025 tgl 31 Okt 2025,Blnja Perdin					6,372,400		
20-11-2025 02820T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa tanggal 4 s/d 7 Nov 2025 an. Adli Saeful,dkk sebanyak 13 orang Surat Tugas No:B-481/03100/KP.650/2025					65,315,700		
23-11-2025 02889T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa tanggal 10 s/d 14 November 2025 an. Widyo Pura Buana,dkk 10 orang Surat Tugas No: B-227/05100/KP.					57,051,622		
03-12-2025 03150T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran belanja perjalanan dinas an Siti S dkk (2 org) keg tgl 26 sd 28 November 2025 sesuai ST no. B-248/05100/KP.650/2025 tgl 17 November					8,360,680		
16-12-2025 03431T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa tanggal 3 s/d 5 Desember 2025 an. Sugi Haryanto,dkk 5 orang sesuai surat Tugas No: B-278/05100/KP.					3,314,000		
<b>BMA.008 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	<b>225,209,000</b>	<b>0</b>	<b>171,690,402</b>	<b>16,183,600</b>	<b>187,874,002</b>	<b>83.42 %</b>	<b>37,334,998</b>
<b>051 PERSIAPAN</b>	<b>68,634,000</b>	<b>0</b>	<b>44,654,675</b>	<b>12,600,000</b>	<b>57,254,675</b>	<b>83.42 %</b>	<b>11,379,325</b>
<b>051.0A TANPA SUB KOMPONEN</b>	<b>68,634,000</b>	<b>0</b>	<b>44,654,675</b>	<b>12,600,000</b>	<b>57,254,675</b>	<b>83.42 %</b>	<b>11,379,325</b>
522151 Belanja Jasa Profesi	23,900,000	0	0	12,600,000	12,600,000	52.72 %	11,300,000
000991. honor moderator	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
000993. honor narasumber pakar/praktisi/pembicara khusus/menteri	1,700,000	0	0	0	0	0.00 %	1,700,000
000994. honor narasumber setingkat eselon iii	18,000,000	0	0	12,600,000	12,600,000	70.00 %	5,400,000
02-12-2025 03063T SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK Pembayaran Belanja Jasa Profesi tanggal 13-20 November 2025 a.n Arie Purwanto dkk (22 orang) sesuai SK no. 251110-03/SKKPA/2025 tanggal 10					12,600,000		
000995. honor narasumber setingkat eselon i	2,800,000	0	0	0	0	0.00 %	2,800,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Nama kegiatan	Agustus 2025		Desember 2025	
	Pagu	Lock Pagu	Pagu	Lock pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BDB.100 PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	41.186.000	0	41.186.000	0
BMA.007 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN	1.882.305.000	1.047.297.000 (persentase lock pagu 55,63 persen)	775.008.000	0
BMA.008 PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	448.640.000	223.431.000 (persentase lock pagu 49,80 persen)	225.209.000	0
Total	2.372.131.000	1.270.728.000 (persentase lock pagu 53,56 persen)	1.041.403.000	0
Pagu yang bisa digunakan	1.101.403.000		1.041.403.000	0

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK**

*BPS - Statistics Indonesia*

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Telp (61-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (61-21) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> Email : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)